



# RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



**MEWUJUDKAN PROVINSI PAPUA BARAT YANG SEHAT,  
BERKUALITAS DAN BERKEADILAN**

## 2017-2022



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
DINAS KESEHATAN

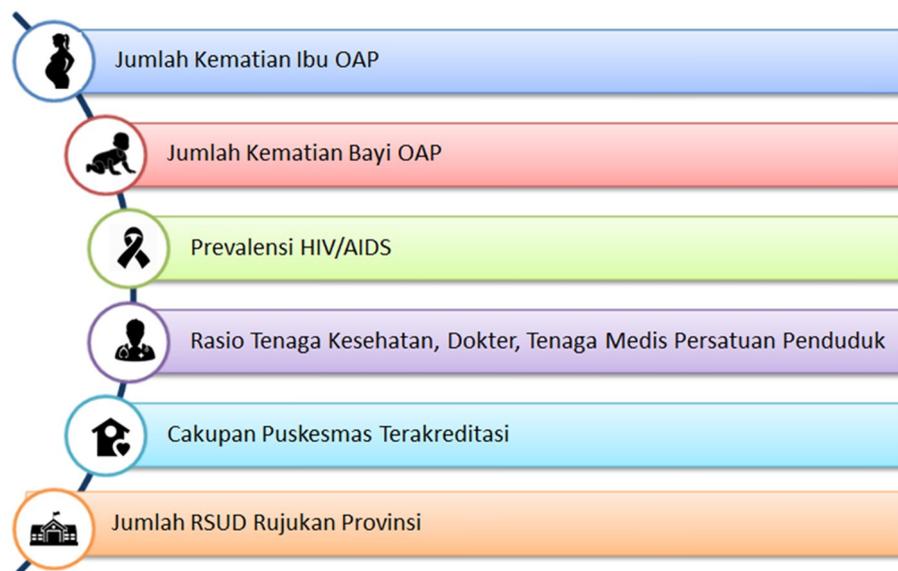
Jl. Brigjen Marinir Abraham O. Ataruri, Kompleks Kantor  
Gubernur Provinsi Papua Barat  
Arfai - Manokwari - Papua Barat Kode Pos : 98315

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
	2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	17
	2.3 Kinerja Pelayanan	19
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	21
BAB III	PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
	3.2 Telaahan Visi Misi Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	31
	3.3 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	34
	3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	34
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI	RENCANA PROGRAM SERTA PENDANAANNYA	52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII	PENUTUP	65
LAMPIRAN	DAFTAR ASET	

## BAB. I

### PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga negara. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua Barat juga dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/ masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berasaskan prikemusiaan, keseimbangan manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat yang selama ini dilaksanakan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian derajat kesehatan di Provinsi Papua Barat masih terhitung rendah apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang antara lain,

ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi, anak balita dan ibu maternal serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang, masih tingginya angka kematian akibat penyakit menular, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antarwilayah, belum meratanya pemenuhan tenaga kesehatan dan terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.

Oleh karenanya dipandang perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai pedoman dalam perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun 2017-2022.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat Tahun 2017-2022.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi pembangunan kesehatan Provinsi Papua Barat secara berkesinambungan.

Adapun penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman dalam perencanaan program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2017-2022.
2. Menjabarkan program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk kurun waktu tahun 2017-2022 .
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
4. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi kinerja dimasa mendatang.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi Misi Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program Kegiatan serta pendanaannya.

Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB. II

GAMBARAN  
PELAYANAN



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

##### 1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan.
- c. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- d. Merumuskan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan dan fasilitasi promosi kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan.

- e. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan.
- f. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan kefarmasian, penelitian dan pengembangan.
- g. Membina, mengawasi dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis.
- h. Mengelola kesekretariatan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan.
- b. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan faslitasi kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi promosi kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan.
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan.
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan kefarmasian, penelitian dan pengembangan.
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

## 2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat
- c. Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit (P2P)
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan

### A. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kesehatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kesehatan.
  - b) Penyusunan program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
  - c) Penyusunan program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
  - d) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat adalah:

a) Sub Bagian Program Informasi dan Humas

Tugas :

Penyiapan dan Kordinasi Penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan.

b) Sub Bagian Keuangan dan Pengeloaan Aset

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

B. Bidang Kesehatan Masyarakat

1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Operasional serta pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesehatan keluarga, Gizi, Promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengamatan, penyelidikan epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra.

b) Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pemberantasan dan pengendalian penyakit.

- c) Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kualitas air dan lingkungan pemukiman.
- d) Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan.

3) Unsur-unsur organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat adalah:

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 1) Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit mempunyai Fungsi:

a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

3) Unsur-unsur Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

a) Seksi Surveilans dan Imunisasi

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

D. Bidang Pelayanan kesehatan

1. Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Bidang pelayanan Kesehatan mempunyai Fungsi Fungsi:

a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional

d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan

rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

E. Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
2. Untuk mendukung tugas pokoknya Bidang Sumber daya Kesehatan mempunyai Fungsi:
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
3. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Kefarmasian

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

b) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan operasional Bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.

c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas:

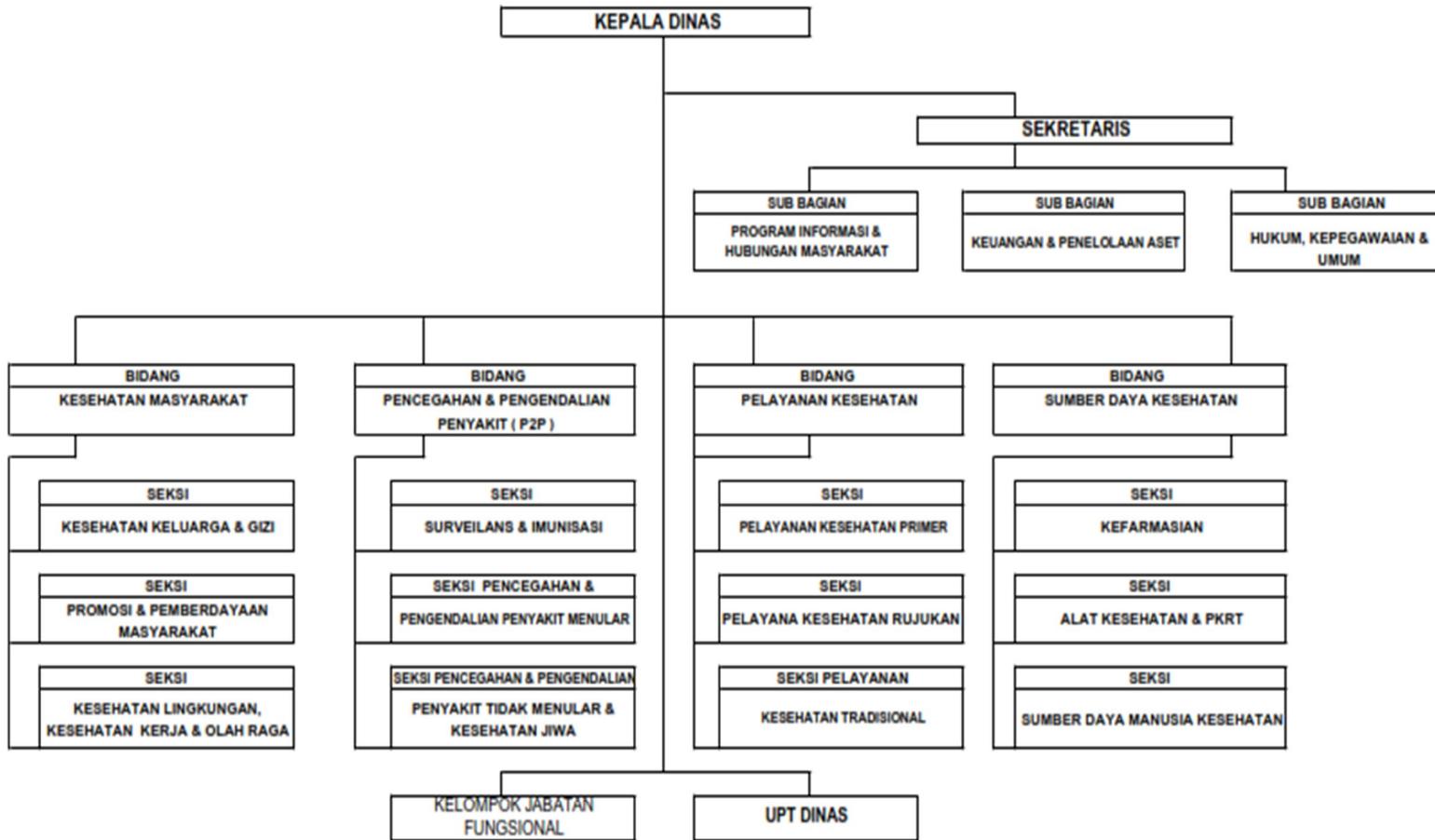
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, yang membawahi:
  - 1) SubBagianProgram, Informasi dan Humas
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset
  - 3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
- C. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahi
  - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
  - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga
- D. Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit (P2P), yang membawahi :
  - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - 2) Seksi Pencegahan & Pengendalian penyakit Menular
  - 3) Seksi pencegahan & pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa
- E. Bidang Pelayanan kesehatan yang membawahi :
  - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
  - 2) Seksi pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 3) Seksi pelayanan kesehatan Tradisional
- F. Bidang Sumber Daya Kesehatan yang membawahi :
  - 1) Seksi Kefarmasian
  - 2) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
  - 3) Sumber Daya Kesehatan

Bagan Struktur Organisasi Dinas kesehatan Provinsi Papua Barat adalah  
Sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

### A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 150 Orang dengan rincian sebagai berikut:

#### Menurut Pendidikan Formal

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA/Sederajat	34
4.	D-I	-
5.	D-II	13
6.	D-III	32
7.	D-IV	1
8.	S-1	39
9.	Dokter/dokter gigi	14
10.	Apoteker	9
12.	S-2	8
13.	S-3	-
	Jumlah	150

#### Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	32
3.	Golongan III	102
4.	Golongan IV	16
	Jumlah	150

### Menurut Tingkat Jabatan/Eselon

No.	Tingkat Jabatan/Eselon	Jumlah
1.	Eselon IV	15
2.	Eselon III	5
3.	Eselon II	1
4.	Fungsional	73
5.	Non Fungsional dan Eselon	56
	Jumlah	150

#### B. Aset yang dikelola

Sampai dengan tahun 2016, aset yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi yang pengadaannya melalui APBD Provinsi Papua Barat maupun melalui APBN (dana dekonsentrasi) terdiri atas :

- a. Bangunan gedung
- b. Tanah
- c. Alat angkutan
- d. Alat-alat kantor dan rumahtangga
- e. Alat-alat studio, Alat-alat kedokteran/kesehatan
- f. Alat-alat laboratorium
- g. Buku Perpustakaan

Selengkapnya daftar aset yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2016 adalah sebagaimana tertera pada lampiran I (Rekapitulasi Barang Dinas kesehatan Papua Barat TA 2016)

## 2.3 Kinerja Pelayanan

NO.	JENIS PELAYANAN	OBJEK PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Promosi Kesehatan Sumber Daya Kesehatan	1.1. Kesepakatan yang dihasilkan 1.2. Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan 1.3. Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	Seluruh masyarakat Tenaga Penyuluh Kesehatan Seluruh Posyandu Tenaga Kesehatan - RSU/RSJ - Institusi Diknakes
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	2.1. Peralatan dan perbekalan kesehatan 2.2. Peningkatan kesehatan masyarakat 2.3. Penanggulangan masalah kesehatan 2.4. Pendidikan dan Pelatihan	Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Seluruh masyarakat Tenaga Kesehatan Puskesmas Pustu dan Jaringannya
3	Pelayanan Kesehatan Penduduk Orang Asli Papua	3.1. Rujukan Bagi Orang Asli Papua 3.3. Jaminan kesehatan Bagi Orang Asli Papua	Masyarakat Papua yang tidak mampu.
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	4.1. Pelayanan Neonatal 4.2. Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam SDIDTK	Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas LS/LP
5	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	5.1. Posyandu Usila 5.2. Pengadaan peralatan penunjang Posyandu Usila	Seluruh penduduk Usila Seluruh Posyandu Usila
6	Perbaikan Gizi Masyarakat	6.1. Penanggulangan masalah gizi 6.2. Pemantauan pertumbuhan 6.3. Pemantauan konsumsi gizi 6.4. Pemantauan konsumsi garam beryodium 6.5. Penanggulangan masalah gizi pasca bencana	Ibu hamil, bayi dan balita Bayi dan anak balita Seluruh rumah tangga Seluruh rumah tangga Penduduk korban bencana
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	7.1. Pencegahan dan penanggulangan 7.2. Pencegahan penyakit endemik/epidemik 7.3. Peningkatan Imunisasi 7.4. Surveillance epidemiologi 7.5. Penanggulangan KLB 7.6. Peningkatan KIE 7.7. Pelayanan kesehatan	Seluruh masyarakat Wilayah endemik/epidemik Calon pengantin, ibu hamil, bayi dan anak balita Seluruh wilayah Papua Barat, Wilayah yang terjadi KLB Seluruh masyarakat Seluruh Jamaah Calon Haji Papua Barat

8	Pengembangan Lingkungan Sehat	8.1. Peningkatan cakupan air bersih	Seluruh masyarakat
		8.2. Peningkatan cakupan jamban keluarga	Seluruh masyarakat
		8.3. Pengawasan TTU dan TPM	Seluruh TTU dan TPM
		8.4. Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi	Seluruh TTU dan TPM

NO.	JENIS PELAYANAN	OBJEK PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
9	Obat dan Perbekalan Kesehatan	9.1. Penyediaan obat buffer stock provinsi 9.2. Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 9.3. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumahsakit 9.4. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Puskesmas, Pustu dan Jaringannya 13 Kabupaten/Kota  Seluruh RumahSakit  Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
10	Pengawasan Obat dan Makanan	10.1. Pengawasan keamanan pangan 10.2. Pengawasan bahan berbahaya	Seluruh masyarakat  Seluruh masyarakat
11	Pengembangan Obat Asli Indonesia	11.1. Standarisasi tanaman obat Bahan asli Indonesia 11.2. Peningkatan promosi obat asli Indonesia	Produsen obat tradisional  Seluruh masyarakat
12	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	12.1. Pelatihan fungsional dan Manajemen Kesehatan 12.2. Pendidikan bagi calon tenaga Dokter Spesialis dan Nakes untuk RS Rujukan Papua Barat  12.4. Pendidikandan Pelatihan 12.5. Peningkatan mutu pelayanan sarana kesehatan	Seluruh tenagakesehatan
13	Kebijakan dan Manajemen kesehatan	13.1. Peningkatan manajemen kesehatan 13.2. Peningkatan kebijakan kesehatan	Dinas Kesehatan  Dinas Kesehatan

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisis berbagai aspek dalam pembangunan kesehatan di Papua Barat, dapat diidentifikasi faktor-faktor kekuatan/strength (S), kelemahan/weakness (W), peluang/opportunities (O) dan ancaman/treats (T) sebagai berikut:

### A. Kekuatan(Strength)

- 1) Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit.
- 3) Adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 4) Adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 5) Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 6) Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
- 7) Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan rujukan.
- 8) Tersedianya peralatan kesehatan dan penunjang kesehatan yang cukup memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan.
- 9) Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar difasilitas pelayanan kesehatan.
- 10) Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensinya.
- 11) Tersedianya alokasi anggaran yang cukup melalui anggaran APBD, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan.

- 12) Terselenggaranya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
- 13) Berkembangnya Desa Siaga dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Diseluruh Kabupaten/Kota di Papua Barat.  
Adanya koordinasi yang cukup baik antara Provinsi dengan Kabupaten/kota.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih lemahnya pemahaman tenaga yang ada terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya dalam pembangunan kesehatan.
- 2) Belum optimalnya pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada.
- 3) Belum optimalnya perkembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
- 4) Masih lemahnya kerjasama lintas sector dan lintas program.
- 5) Masih kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pencatatan dan pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan.
- 7) Belum optimalnya promosi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap pembangunan bidang kesehatan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 2) Adanya kebijakan pengangkatan Bidan PTT Provinsi untuk memenuhi kebutuhan tenaga Bidan, Perawat

dan Ahli Gizi terutama pada daerah terpencil dan sangat terpencil.

- 3) Adanya alokasi anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov).
- 4) Adanya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat untuk peningkatan sarana fisik dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Papua Barat.
- 5) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- 6) Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi seluruh penduduk di Kabupaten/Kota di Papua Barat.
- 7) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk menjangkau wilayah-wilayah di Papua Barat.
- 8) Adanya kebijakan pengalokasian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan di Papua Barat.

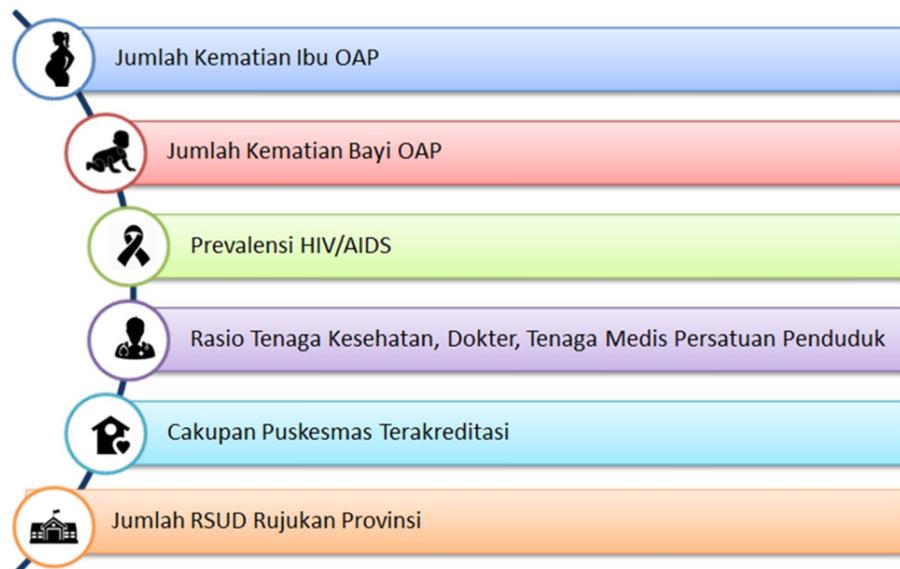
#### d. Ancaman (Threats)

- 1) Masih adanya kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender.
- 2) Munculnya beban ganda penyakit, yaitu pola penyakit yang diderita sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan kasus penyakit tidak menular.
- 3) Meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dimasyarakat.

- 4) Terbukanya perdagangan bebas dan sumberdaya kesehatan yang mengglobal.
- 5) Masuknya modal asing dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga kesehatan.

BAB. III

PERMASALAHAN  
DAN ISU-ISU  
STRATEGIS



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan Provinsi Papua Barat didapatkan dari hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016. Secara nasional Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan naik dari 47 per 100.000 kelahiran hidup pertahun pada tahun 2012 menjadi 49 per 100.000 kelahiran hidup pertahun pada tahun 2016. Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung menurun dari 1.417 dalam kurun 1 Tahun per 1.000 kelahiran hdup pada tahun 2012 menjadi 338 per1.000 kelahiran dalam kurun waktu 1 Tahun pada tahun 2015. Prevalensi gizi kurang pada balita menurun dari 19% pada tahun 2014 menjadi 17,7% pada tahun 2016.

##### 1. Upaya Kesehatan Masyarakat

Upaya kesehatan masyarakat mengalami peningkatan capaian walaupun tidak signifikan seperti Jumlah kematian ibu perkelahiran hidup ditahun 2012 berjumlah 50 orang dan capaian di tahun 2016 berjumlah 49 orang, jumlah kematian bayi ditahun 2012 berjumlah 215 orang dan capaian ditahun 2016 berjumlah 195 orang. Jumlah lahir hidup di kabupaten/kota tidak mencapai angka 1.000 sehingga penilaian capaian kinerja dilakukan atas dasar jumlah kematian dan bukan angka kematian. Untuk jumlah orang asli papua yang menjadi indikator belum bisa dilakukan penilaian sebab pada layanan kesehatan belum memilah untuk orang asli papua dan bukan orang asli papua. Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas perlu ditingkatkan serta perhatian perlu diberikan kepada

pengembangan Kampung Siaga karena belum semua Kampung memiliki Pos Kesehatan Kampung (Poskeskam), masih terbatasnya jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan PONEC dan perlunya peningkatan mobilisasi ibu hamil untuk bersalin pada tenaga kesehatan dan upaya peningkatan kualitas Posyandu menjadi Posyandu Purnama dan Mandiri perlu lebih digiatkan.

## 2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol di Papua Barat terutama TB, Malaria, DBD dan Diare. Cakupan program imunisasi berdasarkan laporan rutin dari Kabupaten/Kota secara umum menunjukkan peningkatan. Cakupan imunisasi pada tahun 2016 adalah BCG 93.4%, DPT-HB 391.6%, HB (0-7hari) 59.2%, Polio 490.2% dan Campak 90.8%. Meski telah berjalan baik, program imunisasi belum optimal, karena cakupan saat ini belum merata yang digambarkan melalui persentase Kampung yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2016 mencapai 45,93%. Penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis Paru dan Malaria sudah mengalami peningkatan pengendaliannya untuk masa yang akan datang. Penemuan kasus HIV/AIDS meningkat dengan meningkatnya outreach dan keterbukaan masyarakat terhadap penyakit ini. Case Detection Rate (CDR) tuberkulosis paru menurun menjadi 54% pada tahun 2016, untuk itu perlu perhatian lebih pada upaya deteksi tuberkulosis paru dan juga keberhasilan pengobatannya. Ketersediaan reagen, pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) di tingkat pelayanan primer harus diperhatikan. Untuk malaria, daerah endemis semakin meluas dan ada kecenderungan

terjadi resistensi di daerah endemis, perlu peningkatan upaya promotif dan preventif serta kerja sama sektor terkait dengan man made breeding places.

### 3. Perbaiki Gizi Masyarakat

Beberapa hasil yang telah dicapai oleh program perbaikan gizi masyarakat antara lain pemberian kapsul vitamin A pada anak balita usia 6-59 bulan sebesar 90% melampaui target 80% dan pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil telah mencapai 90% dari target 80%. Hasil Riskesdas menunjukkan terjadinya perbaikan status gizi anak balita, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sebesar 10.70% yang terdiri dari 10.40% gizi kurang dan 0.30% gizi buruk. Keadaan gizi pada ibu hamil, bayi dan anak balita perlu terus ditingkatkan karena masih tingginya bayi yang lahir rendah (BBLR) sebesar 11.5% dan tingginya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama (kronis) yaitu 36.8% (Riskesdas, 2007). Disparitas status gizi juga cukup lebar antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi. Ke depan perbaikan gizi perlu difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan anak sampai usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas generasi yang akan datang.

### 4. Kebijakan Penganggaran

Penganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif lebih besar. Dana bantuan untuk Kabupaten/Kota sebaiknya juga mulai direncanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembiayaan Kabupaten/Kota dan besaran masalah masing-masing daerah. Berdasarkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat terdapat Kabupaten/Kota

dengan masalah kesehatan sangat besar, memerlukan dukungan sumber daya yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Dalam kaitannya dengan pembiayaan kesehatan sejak 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan sudah mencapai target 15% seperti tercantum dalam Sistem Kesehatan Provinsi (SKP).

#### 5. Sistem Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) saat ini sangat memerlukan penguatan dan untuk informasi evidence planning tidak tersedia. Sistem Informasi Kesehatan on-line yang berbasis fasilitas masih harus terus dikembangkan di Papua Barat meliputi pengembangan jaringan, input, dan entrypoint di daerah dan fasilitas kesehatan serta pemanfaatan informasi.

#### 6. Sumber Daya Kesehatan

Untuk program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target. Sampai dengan tahun 2016 rasio tenaga kesehatan masih belum mencapai target per 100.000 penduduk, seperti untuk dokter spesialis 4,26 per 100.000 penduduk (target 9 per 100.000 penduduk), dokter umum sebesar 26,3 per 100.000 penduduk (target 30 per 100.000 penduduk), dokter gigi sebesar 7,7 per 100.000 penduduk (target 11 per 100.000 penduduk), perawat sebesar 157,75 per 100.000 penduduk (target 158 per 100.000 penduduk) dan bidan sebesar 43,75 per 100.000 penduduk (target 75 per 100.000 penduduk).

Dalam pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP Nomor 38 tahun 2000 dan PP Nomor 41 tahun

2000). Oleh karena itu diperlukan penanganan yang lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karir.

#### 7. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat esensial generik disarana pelayanan kesehatan baru mencapai 69.74% dari target 95%, anggaran untuk obat esensial generik di sektor publik sebesar 14.47% dengan target setara dengan \$ 2 US perkapita. Peresepan Obat Generik Berlogo (OGB) di Puskesmas sudah sebesar 90% namun di RSUD sebesar 66% dan Rumah Sakit Swasta dan apotek sebesar 49%. Dalam pengadaan obat sering terkendala sistem pengadaan yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan vaksin. Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah tetapi akses masyarakat terhambat karena adanya asymmetric information dan praktek pemasaran yang kurang baik dan sekitar 30% obat resep dijual langsung oleh dokter, bidan atau perawat.

#### 8. Kebijakan dan Manajemen

Untuk Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran. Capaian program yang menggembirakan diantaranya penduduk miskin yang menjadi Peserta jaminan kesehatan dan terlayani sudah 97,07%, tertanggulangnya masalah kesehatan akibat bencana secara cepat, serta penyampaian pesan kesehatan dan citra positif Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sudah dilakukan

secara efektif, utamanya melalui media massa baik cetak maupun elektronik namun perlu penguatan untuk advokasi.

Pembangunan kesehatan perlu memberikan penekanan pada peningkatan kesetaraan gender (gender equity) dalam rangka memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh akses, partisipasi, manfaat dan control antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan perannya dalam pembangunan kesehatan. Diharapkan pada akhir pembangunan 5 tahun kedepan (2022) terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua Barat.

#### 9. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami peningkatan capaian, seperti rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat menjadi 48.66%. Namun kita harus memberikan perhatian pada perilaku merokok yang semakin memburuk dengan makin mudanya usia awal perokok, selain itu pemberian ASI Eksklusif yang menurun disebabkan baik oleh perilaku maupun besarnya pengaruh dari luar seperti pemberian susu formula gratis pada saat ibu melahirkan.

#### 10. Lingkungan Sehat

Untuk Program Lingkungan Sehat, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi telah berhasil ditingkatkan, seperti peningkatan pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 73,23% belum mencapai target sebesar 75%, persentase keluarga menggunakan air bersih meningkat dari 58,3% menjadi 60,33% dari target 85% pada tahun 2010, dan peningkatan persentase Tempat Tempat Umum (TTU) sehat 78,5% belum mencapai target 85% pada tahun 2016. Selain itu kita juga perlu

memberikan perhatian pada terjadinya peningkatan rumah tangga yang tidak memiliki saluran pembuangan air limbah dan masih ada rumah tangga yang memelihara unggas atau ternak dalam rumah.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Papua Barat selama kurun waktu tahun 2012-2016 sudah dapat ditunjukkan dengan tercapainya indikator sasaran, namun saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk lebih memberikan penajaman dan kesinambungan program-program yang dilaksanakan untuk periode berikutnya. Pembangunan kesehatan dengan fokus wilayah diharapkan memperoleh perhatian, terdapat daerah-daerah di Papua Barat dengan capaian derajat kesehatan yang sangat rendah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat rendah atau terendah di antara Kabupaten/Kota lainnya. Daerah seperti ini memerlukan pendekatan penanggulangan yang sesuai.

### 3.2 Telaahan Visi Misi Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Berdasarkan RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat terpilih untuk Periode 2017-2022 yang mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Pembangunan kesehatan Indonesia pada periode 2017-2022 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan financial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran RPJMD 2017-2022 adalah : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan indikator utama sebagai berikut : 1) angka kematian ibu orang asli papua (OAP); 2) angka kematian bayi orang asli papua (OAP); 3) prevalensi HIV/AIDS; 4) Rasio tenaga kesehatan,

dokter, tenaga medis per satuan penduduk; 5) cakupan puskesmas terakreditasi di distrik; dan 6) RSUD rujukan provinsi.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional :1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarus-utamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan daerah 2017-2022 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2017-2027, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidupsehat bagi setiap orang asli papua agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat pada tahun 2017-2022, yaitu:

- 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;
- 2) Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial dibidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko social dan financial dibidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:
  - a. Menurunnya beban rumahtangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%
  - b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Dengan memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 telah selaras dan sejalan, dimana tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta strategi pembangunan kesehatan mempunyai relevansi sesuai yang diharapkan.

### 3.3 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengacu pada RPJDM Provinsi Papua Barat 2017-2022 dan Renstra Kementerian Kesehatan RI. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tidak terlepas dari Program Kegiatan Kementerian Kesehatan RI.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengakomodasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, terutama mengenai pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan yang merupakan lampiran dari peraturan Pemerintah tersebut.

Target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam pembangunan bidang kesehatan tidak membahas mengenai tataruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, dibentuknya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tiap desa, dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan Rumahsakit melalui Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas), dan Jamkesda. Namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah Papua Barat, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal dan terpencil.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan kesehatan di rumahsakit bagi masyarakat miskin. Untuk peningkatan akses tersebut Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan pada jumlah Bed Occupation Ratio (BOR) kelas III yang dikhususkan bagi masyarakat tak mampu. Selain itu sistem rujukan belum berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan tidak efisien. Kebijakan serta pembinaan dan pengawasan belum mencakup klinik dan rumah sakit swasta serta dirasakan belum terkoordinasinya pelayanan kesehatan secara kewilayahan.

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan namun penularan infeksi penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target nasional. Selain itu terdapat beberapa penyakit seperti penyakit Filariasis, Kusta cenderung meningkat.

Disamping itu terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai, perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Akibat dari cakupan Universal Child Immunization (UCI) yang belum tercapai akan berpotensi timbulnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di beberapa daerah risiko tinggi yang selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya wabah. Untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I perlu upaya imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata.

Untuk anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya lebih pada alokasi yang cenderung pada upaya kuratif dan masih kurangnya anggaran untuk biaya operasional dan kegiatan langsung untuk Puskesmas. Terlambatnya realisasi anggaran juga terjadi karena proses anggaran yang terlambat.

Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Tingginya persentase masyarakat yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan mengakibatkan rendahnya akses masyarakat dan risiko pembiayaan kesehatan yang berakibat pada timbulnya kemiskinan.

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di daerah terpencil dan tertinggal. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, system penghargaan dan sanksi belum sebagaimana mestinya.

Masalah kurangnya tenaga kesehatan baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping

itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.

Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Papua Barat mengacu pada Sistem Kesehatan Provinsi (SKP), tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi ditingkat pimpinan.

Sistem Informasi Kesehatan menjadi lemah setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut "wawasan kesehatan" perlu dijadikan sebagai asas pokok program pembangunan daerah.

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggungjawab dari berbagai sektor terkait lainnya, di samping tanggung jawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, OPD dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem daerah lainnya.

Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan kesehatan, diperlukan pemikiran tidak konvensional mengenai kebijakan program kesehatan masyarakat dan sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan lainnya, terutama yang berada di luar domain sektor kesehatan. Dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada, di antaranya factor social ekonomi yang menentukan situasi dimana masyarakat tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap penyakit dan komplikasinya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai target daerah (RPJPD,RPJMD), dan target nasional.

Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya pro-aktif tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul dan mencegah hilangnya produktivitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat member nilai tambah.

Dari analisis situasi dan kecederungan diatas dan dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu-isu strategis yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Papua Barat adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil.
- b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
- c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- d. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- e. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
- f. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
- g. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
- h. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
- i. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan, kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
- j. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan dan urban-rural masih terjadi, untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah.
- k. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan melalui pendekatan komprehensif.
- l. Pemenuhan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan masih belum optimal.

Tabel T-B 35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Angka harapan hidup di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat masih rendah seperti Kabupaten Teluk Wondama yaitu selama 59 tahun, Kabupaten Teluk Bintuni 59,5 tahun, dan Kabupaten Tambrau selama 59,2 tahun;	1	Masih rendahnya Tingkat kesehatan	1	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang masalah Kesehatan
2	Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dalam berbagai spesialisasi kemampuan, seperti Dokter umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidah, Ahli Farmasi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, serta Ahli Glzi. Dari Total 2.166 tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Papua Barat, hanya terpusat di beberapa daerah, sementara daerah seperti Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak sama sekali tidak memiliki tenaga kesehatan. Rasio di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 sebesar 3.601, yang artinya sekitar 3.601 penduduk akan diobati oleh 1 dokter;	1	SDM kesehatan terutama dokter, bidan dan perawat di Papua barat saat ini jumlahnya yang tidak memadai dan pendistribusian yang tidak merata	1	kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
3	Beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat belum memiliki rumah sakit seperti Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Maybrat, dan Tambrau;		Pemerintah daerah kabupaten dimaksud masih kesulitan dalam upaya Pembebasan Lahan/ Hak Ulayat untuk pendirian Rumah Sakit		kurangnya Pengetahuan Masyarakat daerah setempat tentang berdirinya Fasilitas kesehatan
4	Fenomena kelahiran dengan menggunakan jasa dukun juga masih terjadi di Provinsi Papua Barat dengan persentase sebesar 13,56%. Hal ini terjadi di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh tenaga kesehatan;		SDM kesehatan terutama dokter, bidan dan perawat di Papua barat saat ini jumlahnya yang tidak memadai dan pendistribusian yang tidak merata		kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel T-B 35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
5	Cakupan balita yang belum mendapatkan imunisasi masih cukup tinggi (<95%). Pada tahun 2015 persentase balita yang mendapatkan imunisasi BCG sebesar 81,83%, imunisasi DPT sebesar 73,53%, imunisasi campak sebesar 65,73 persen, dan imunisasi hepatitis b sebesar 69,98%;	Pemahaman Masyarakat terkait penting Imunisasi bagi balita dan Bayi	Petugas tidak berada di tempat tugas, petugas kurang memberikan advokasi kepada masyarakat melalui tokoh adat dan tokoh agama terkait pentingnya Imunisasi
6	Keterbatasan pengetahuan masyarakat menyebabkan alat kesehatan yang sudah didistribusikan menjadi tidak bermanfaat. Sehingga sangat dibutuhkan tenaga kesehatan/penyuluh yang bersifat edukatif;	SDM kesehatan terutama dokter, bidan dan perawat di Papua barat saat ini jumlahnya yang tidak memadai dan pendistribusian yang tidak merata	kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
7	Banyak masyarakat di Papua Barat yang belum memiliki kartu kesehatan (Kartu Indonesia Sehat maupun BPJS) sehingga menyulitkan mereka saat datang ke puskesmas atau rumah sakit;	1 Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Kartu Indonesia Sehat dan BPJS	1 Kurangnya Sosialisasi dan advokasi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini BPJS
8	Masalah kesehatan menjadi semakin kompleks karena gaya hidup dan sarana kebersihan yang terbatas pada tempat tinggal masyarakat, seperti sarana air bersih, MCK, edukasi makanan bergizi, dll;	Rendahnya pengetahuan Masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kurangnya Advokasi dan Sosialisasi Petugas Promosi Kesehatan pada Wilayah kerja masing-masing

Tabel T-B 35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
9	Adanya stigma negatif ditengah masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS sehingga rendahnya keinginan penderita untuk melaporkan diri dan mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut	kurangnya informasi dan mediasi kepada penderita ODHA dan Masyarakat tentang pentingnya Kondom	Pemerintah dan Petugas Kesehatan kurang dalam memberikan Informasi dan Advokasi kepada penderita dan Masyarakat terkait pentingnya Kesehatan dalam melakukan hubungan seksual, dan tentang bahaya tertularnya melalui darah dan lain-lain

BAB. IV

TUJUAN DAN  
SASARAN



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2017-2022. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Papua Barat dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya.

Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah provinsi papua barat, maka OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menetapkan 2 misi prioritas yaitu :

1. Menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis Aparatur yang berwibawa serta otonomi khusus yang efektif.

Tujuan pada misi ini adalah Meningkatkan Aksebilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan OPD Bidang Kesehatan. dengan sasaran yang terdiri dari :

- 1) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD
- 2) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
- 3) Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur

4) Meningkatnya kualitas system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2. Misi 2 adalah Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang Pendidikan dan kesehatan.

Tujuan daripada misi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasaran-sasaran capaiannya adalah :

1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan

Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2022 adalah :

- a. Presentase ketersediaan obat dan vaksin
- b. Presentase kabupaten/kota yang minimal 25% fasilitas kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas
- c. Cakupan balita gizi buruk (OAP) dapat asupan makanan tambahan
- d. Menurunkan angka kematian ibu (OAP) menjadi 23 kelahiran hidup
- e. Menurunkan angka kematian bayi (OAP) menjadi 16 per kelahiran hidup
- f. Ibu hamil (OAP) dapat asupan makanan tambahan
- g. Angka kematian bayi (OAP)

2) Meningkatkan akses dan ketersediaan sarana dan prasaran kesehatan yang berkualitas dan merata

Meningkatnya akses dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan indikator yaitu :

- a. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
- b. Jumlah Rumah Sakit Kelas C yang terakreditasi
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Rujukan Provinsi
- d. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

3) Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya manusia khususnya OAP

Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2022 adalah :

- a. Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan OAP sesuai standar.
- b. Persentase Rumah Sakit memiliki dokter spesialis OAP sesuai standar.
- c. Pendidikan Apoteker OAP di fasilitas kesehatan
- d. Penempatan Apoteker OAP di fasilitas kesehatan
- e. Persentase tenaga medis OAP kompetensi khusus

4) Meningkatkan pengendalian penyakit kritis kesehatan dan bencana

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit kritis kesehatan, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Prevalensi Tuberculosis
- b. Annual Paracite Rate Index-API (kasus Malaria)
- c. Prevalensi HIV pada ppopulasi orang dewasa
- d. Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan
- e. Persentase Kampung yang mencapai UCI
- f. Angka kesakitan DBD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan  
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Tahun ke -														
			Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V						
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan OPD						2.709.114.240										
	1.1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan APBD															
		1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.630.749.828	100%	6.829.672.323	100%	7.034.562.492	100%	7.245.599.367	100%	7.462.967.348					
		1.1 Tersedianya layanan jasa pos sesuai rencana kebutuhannya	12 Laporan	24.000.000	12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	33.599.367	12 Laporan	35.000.000					
		1.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik selama 1 tahun	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.100.000.000	1 Paket	1.150.000.000	1 Paket	1.160.000.000	1 Paket	1.190.000.000					
		1.3 Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhannya	12 laporan	45.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	57.000.000	12 laporan	65.000.000	12 laporan	70.000.000					
		1.4 Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	12 laporan	1.700.000.000	12 laporan	1.620.000.000	12 laporan	1.625.000.000	12 laporan	1.700.000.000	12 laporan	1.750.000.000					
		1.5 Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	12 laporan	290.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	275.000.000	12 laporan	350.000.000	12 laporan	355.000.000					
		1.6 Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 laporan	200.000.000	12 laporan	220.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	257.000.000					
		1.7 Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	12 laporan	200.000.000	12 laporan	220.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	257.000.000					
		1.8 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	53.149.828	1 Paket	50.000.000	1 Paket	52.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	63.967.348					
		1.9 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	450.000.000					
		1.10 Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan penunjang lainnya	12 Laporan	183.600.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	230.000.000	12 Laporan	245.000.000	12 Laporan	250.000.000					
		1.11 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	2.100.000.000	12 Laporan	2.110.000.000	12 Laporan	2.115.000.000	12 Laporan	2.200.000.000					
		1.12 Tersedianya struktur Dinkes sesuai kebutuhan daerah	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	351.000.000	12 Laporan	352.000.000	12 Laporan	350.000.000					
		1.13 Tersediannya jasa pengelola Web Site	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.672.323	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	160.000.000					
		1.14 Tersediannya Jasa pengelola data Informasi Kesehatan	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	48.000.000	12 Laporan	59.562.492	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	75.000.000					
	1.2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	2	100%	2.553.600.000	2	100%	2.630.208.000	2	100%	2.709.114.240	2	100%	2.790.387.667	2	100%	2.874.099.297
		2.1 Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	1 Paket	230.000.000	1 Paket	235.000.000	1 Paket	240.000.000					
		2.2 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	849.400.000	1 Paket	849.400.000	1 Paket	890.000.000	1 Paket	900.000.000	1 Paket	975.099.297					
		2.3 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Paket	500.000.000	1 Paket	620.000.000	1 Paket	620.000.000	1 Paket	672.000.000	1 Paket	673.000.000					
		2.4 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	260.000.000	1 Paket	261.000.000					
		2.5 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	172.000.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	73.000.000	1 Paket	74.000.000					
		2.6 Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket						
		2.7 Terlaksananya Pembangunan/Penataan Halaman Gudang Perbekalan Kesehatan	1 Paket	582.200.000	1 Paket	618.808.000	1 Paket	647.114.240	1 Paket	650.387.667	1 Paket	651.000.000					

	1.3	Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	500.000.000	100%	515.000.000	100%	530.450.000	100%	546.363.500	100%	562.754.405
			3.1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	170.000.000	1 Paket	175.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	185.913.500	1 Paket	190.390.905
			3.2	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket	160.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	170.450.000	1 Paket	176.450.000	1 Paket	184.450.000
			3.3	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu	1 Paket	170.000.000	1 Paket	175.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	184.000.000	1 Paket	187.913.500
			4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	500.000.000	100%	515.000.000	100%	530.450.000	100%	546.363.500	100%	562.754.405
			4.1	Jumlah Pegawai yg kompeten sesuai materi Pendidikan dan pelatihan formalnya	4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang	
			4.2	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			4.3	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			4.4	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
	1.4	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja SKPD	100%	4.064.412.960	100%	4.186.345.349	100%	4.311.935.709	100%	4.441.293.781	100%	4.574.532.594
			5.1	Paket laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sesuai ketentuan yang berlaku	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	65.000.000
			5.2	Dokumen Renja dan LKPD yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	70.000.000
			5.3	Dokumen RKA dan DPA yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000
			5.4	Laporan keuangan semesteran dan pelaporan prognosis realisasi anggaran yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000
			5.5	Laporan keuangan OPD akhir Tahun yang tepat Syarat dan waktu	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	65.000.000
			5.6	Laporan SKP PNS dan Laporan Administrasi dan Profil Kepegawaian Lingkup OPD	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	50.000.000
			6.1	Terkumpul dan Termutakhirnya Data dan Tersusunnya Data Dasar Puskesmas Kab/Kota Se Papua Barat	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	355.000.000	1 Laporan	360.000.000
			6.2	Terkumpul dan Termutakhirnya Data Profil Kesehatan Provinsi	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	535.000.000	1 Laporan	550.000.000
			6.3	Terlaksananya koordinasi teknis Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	355.000.000	1 Laporan	355.000.000
			6.4	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	450.000.000
			6.6	Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah	1 Laporan	2.000.000.000	1 Laporan	2.121.932.389	1 Laporan	2.247.522.749	1 Laporan	2.251.293.781	1 Laporan	2.261.532.594
			6.7	Terlaksananya Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Papua Barat	1 Laporan	239.412.960	1 Laporan	239.412.960	1 Laporan	239.412.960	1 Laporan	240.000.000	1 Laporan	253.000.000
2	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	2.1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100%	14.284.586.809	100%	17.141.504.171	100%	20.569.805.005	100%	24.683.766.006	100%	29.620.519.208
			26.1	Ketersediaan Obat dan Vaksin	1 Paket	10.436.000.000	1 Paket	12.191.504.171	1 Paket	15.109.805.005	1 Paket	17.513.766.006	1 Paket	20.100.519.208
			26.2	Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang terlayani sesuai dengan permintaan/ kebutuhan dan atau alokasi pengelola program	1 Paket	3.423.586.809	1 Paket	4.500.000.000	1 Paket	5.000.000.000	1 Paket	6.700.000.000	1 Paket	9.040.000.000
			26.3	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas pengelola obat	29 Orang	265.000.000	29,2 Orang	275.000.000	29 Orang	280.000.000	29 Orang	285.000.000	29 Orang	290.000.000
			26.4	Terlaksananya Evaluasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dasar dan Program	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	185.000.000	1 Laporan	190.000.000

	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 25% fasilitas pelayanan kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas		25%	8.150.226.260		31%	10.595.294.138		46%	13.773.882.379		62%	17.906.047.093		77%	23.277.861.221
19.1	Jumlah paket pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan	1	Paket			1	Paket			1	Paket			1	Paket	
19.2	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan	29,2	Orang			29,2	Orang			29	Orang			29	Orang	
19.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti workshop Keselamatan Pasien	29,2	Orang			29,2	Orang			29	Orang			29	Orang	
19.4	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti workshop Internal dan Tinjauan Manajemen	29,2	Orang			29,2	Orang			29	Orang			29	Orang	
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan		100%				100%				100%				100%	
10.1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan	
10.2	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan	1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan	
	Jumlah paket kegiatan kampanye		1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan
10.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29	Orang			29,2	Orang			29	Orang			29	Orang	
10.4	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29	Orang			29,2	Orang			29	Orang			29	Orang	
10.5	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan surveilans	13	Kab/Kota			13	Kab/Kota			29	Kab/Kota			29	Kab/Kota	
10.6	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pelacakan	13	Kab/Kota			13	Kab/Kota			29	Kab/Kota			29	Kab/Kota	
10.7	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29	Orang			29,2	Orang			29	Orang			29	Orang	
10.8	Jumlah bangunan dan fasilitas TFC yang dapat disediakan	1	Paket			1	Paket			1	Paket			1	Paket	
10.9	Jumlah paket logistik penunjang program gizi yang dapat disediakan	1	Paket			1	Paket			1	Paket			1	Paket	
	Persentase Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)		70%				80%				90%				100%	
18.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan	
18.2	Tersedia 1 laporan jumlah kepesertaan JKN	1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan	
18.3	Tersedia 1 laporan jumlah kepesertaan JKN	1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan	
18.4	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	30	Orang			30	Orang			30	Orang			30	Orang	
18.5	Tersedia 13 laporan bimtek dan monev	13	Laporan			13	Laporan			13	Laporan			13	Laporan	
18.6	Tersedia 1 laporan pelaksanaan JKN	1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan			1	Laporan	
	Persentase Kemitraan Kesehatan Terhadap Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Kemasyarakatan		25%				30%				35%				40%	
16.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1														
	Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat		13				13				13				13	
14.1	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat	29														
14.2	Tersedianya sarana air minum dan sanitasi dasar oleh masyarakat hasil dari pemberdayaan	29														



9.4	Jumlah Bidan Koordinator yang mengikuti orientasi	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
9.5	Jumlah Paket Fasilitas Pelayanan yang dapat disediakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/kota	100%		100%		100%		100%		100%	
10.1	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
10.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
10.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
10.4	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
10.5	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
10.6	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
10.7	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
10.8	Jumlah paket penunjang berupa UKS Kit yang dapat disediakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/kota	100%		100%		100%		100%		100%	
11.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Kabupaten/kota	100%		100%		100%		100%		100%	
12.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
12.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
12.3	Jumlah Lansia Kit yang dapat disediakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
	Persentase Kab/kota yang melaksanakan Keluarga Sehat	25%		30%		35%		40%		50%	
13.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1									
13.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29									
13.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan yang dapat disediakan	1									
	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang dilaksanakan di lingkungan kantor Gubernur Papua Barat	100%		100%		100%		100%		100%	
14.1	Jumlah paket pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
14.2	Jumlah paket logistik pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
14.3	Jumlah pertemuan sosialisasi yang dilakukan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
	Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	31%		46%		62%		77%		100%	
15.1	Tersosialisasinya program kesehatan kerja	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
15.2	Terlaksananya kegiatan program kesehatan kerja di kab/kota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	

2.2	Meningkatkan Akses dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas dan Merata	Cakupan Puskesmas Terakreditasi di Distrik	10%	38.465.377.230	29%	56.207.810.197	49%	61.973.864.657	68%	67.122.739.950	87%	71.243.335.741
	23.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan									
	23.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26 Orang									
	23.3	Tersedia 13 laporan bimtek dan monev	13 Laporan									
	23.4	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan									
		Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	70%		80%		90%		100%		100%	
		Jumlah Rumah Sakit Rujukan	0	105.555.923.025	0	110.833.719.176	1	116.375.405.135	2	122.194.175.392	3	128.303.884.161
	24.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan									
	24.2	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan									
	24.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26 Orang									
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0192		0,0229		0,0229		0,0244		0,0244	
	25.1	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Secara Bertahap	1 Paket									
	25.2	Terlaksananya Registrasi Rumah Sakit Provinsi	1 Laporan									
	25.3	Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium Rumah Sakit	1 Paket									
		Cakupan Sarana dan Prasarana UTD dan BDRS Tingkat Provinsi	70%		80%		90%		100%		100%	
	29.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan									
	29.2	Jumlah tenaga dokter yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
	29.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
	29.4	Tersedianya Sarana dan Prasarana UTD Tingkat Provinsi	1 Paket									
		Persentase Pasien Masyarakat OAP Sakit Berat di Rujuk	100%	20.571.461.156	100%	24.685.753.388	100%	29.622.904.065	100%	35.547.484.878	100%	42.656.981.854
	17.1	Tersedianya Akses Rujukan Kesehatan Bagi Orang Papua	1 Paket									
	17.2	Terbiayainya Operasional Program Rujukan bagi Orang Asli Papua	1 Laporan									
	17.3	Peningkatan pemahaman regulasi program	1 Laporan									
		Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan	29	1.296.000.000	29	1.555.200.000	29	1.866.240.000	29	2.239.488.000	29	2.687.385.600
	31.1	Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
	31.2	Jumlah Bidan yang ditempatkan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
	31.3	Tersedia 13 laporan monev keberadaan Tenaga Kesehatan	13 Laporan									

				TK : 1,05: D : 0,52: TM : 0,53		TK : 1,32: D : 0,65: TM : 0,67		TK : 1,57: D : 0,77: TM : 0,80		TK : 1,81: D : 0,89: TM : 0,92		TK : 2: D : 1: TM : 1	
			Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk										
			30.1 Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			30.2 Tersedia 13 laporan money Data SDMK	13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan	
			Pencapaian Uci desa	64,74	1.650.000.000	73,83%	1.815.000.000	82,73%	1.996.500.000	91,43%	2.196.150.000	100,00%	2.415.765.000
			35.1 Jumlah dinas kesehatan yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan imunisasi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			35.2 Jumlah kab/kota yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan KIP	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			35.3 Ditemukan adanya kasus AFP	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			35.4 Meningkatnya pengetahuan tentang penanggulangan KLB PD3I dan PIE	26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
			45 Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM	85%	836.000.000	90%	919.600.000	94%	1.011.560.000	98%	1.112.716.000	100%	1.223.987.600
			45.1 Terdapat jumlah petugas yang terlatih untuk Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	24 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
			45.2 Terdapat jumlah petugas yang terlatih dalam penanggulangan penyakit tidak menular	15 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
			45.3 Terbentuknya Posbindu di semua Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			45.4 Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota	100%		100%		100%		100%		100%	
			40.1 Adanya keperluan petugas dalam pengelolaan program penderita hipertensi di kab/kota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota	100%		100%		100%		100%		100%	
			41.1 Adanya keperluan petugas dalam pengelolaan program penderita DM di kab/kota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			Angka kematian calon jemaah haji < 2 per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji sampai tahun 1443H / 2022M	< 2	385.000.000	< 2	423.500.000	< 2	465.850.000	< 2	512.435.000	< 2	563.678.500
			22.1 Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan										
			22.2 Jumlah tenaga Tim Pemeriksa Kesehatan Haji yang mengikuti pelatihan										
			22.3 Jumlah paket logistik pelayanan kesehatan haji yang tersedia di Kabupaten/Kota										
			22.4 Terpantaunya kondisi kesehatan calon jemaah haji										
			Jumlah Tanaman Obat Asli Papua Yang terdata	20	220.000.000	40	242.000.000	60	266.200.000	80	292.820.000	100	322.102.000
			27.1 Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota	100%	330.000.088	100%	363.000.097	100%	399.300.106	100%	439.230.117	100%	483.153.129
			42.1 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
			42.2 Jumlah dokumen konsultasi teknis ke Pusat yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			42.3 Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	

	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan		3	495.000.000		5	544.500.000		8	598.950.000		11	658.845.000		13	724.729.500	
49.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	
49.2	Terlatihnya petugas kesehatan indera pada FKTP		26	Orang		26	Orang		26	Orang		26	Orang		26	Orang	
	Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022			1.90%	7.800.522.939		1.80%	8.580.575.233		1.70%	9.438.632.756		1.60%	10.382.496.032		1.50%	11.420.745.635
34.1	Terlatihnya tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat		26	Orang		30	Orang		32	Orang		34	Orang		36	Orang	
34.2	Ditemukan dan dilayannya seluruh penderita HIV Khususnya (OAP) sesuai standar	2.00	%			1.90	%		1.80	%		1.70	%		1.60	%	
	Cakupan Penanggulangan Diare		100%			100%			100%			100%			100%		
48.1	Terdapatnya kesepakatan dalam melaksanakan rencana tindak lanjut		1														
48.2	Peningkatan Kapasitas Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB Diare, Hepatitis, ISP		23														
48.3	Tertanggulangnya KLB Diare, Hepatitis, ISP																
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia		100%			100%			100%			100%			100%		
47.1	Terdapatnya petugas frambusia yang terlatih																
47.2	Meningkatnya Jumlah kasus baru frambusia yang di temukan																
	Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota		100%			100%			100%			100%			100%		
46.1	Adanya keperluan petugas dalam pengelolaan program ISPA di kab/kota		23														
	Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta		3			5			8			11			13		
43.1	Mensosialisasikan Kusta pada masyarakat		1														
43.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan		26														
	Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis		85%			90%			95%			97%			100%		
44.1	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Petugas																
44.2	Terlaksananya gerakan Bulan Eliminasi kaki Gajah																
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria		65.04%			88.78%			90.50%			95.49%			100%		
36.1	Terdapatnya tenaga Entomologi yang terlatih di puskesmas		26														
36.2	Meningkatnya Jumlah dokter ,Perawat, bidan yang terlatih		26														
36.3	Meningkatnya Jumlah dokter, Perawat, Bidan yang terlatih		26														
36.4	Meningkatnya Jumlah Crosschecker malaria yang terlatih		26														
36.5	Meningkatnya Jumlah mikroskopist yang dilatih		26														
36.6	Tersedianya tenaga surveilans malaria yang terlatih		26														



BAB. V

STRATEGI DAN ARAH  
KEBIJAKAN



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Barat yaitu Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing misi dan prioritas sebagai berikut :

1. Untuk mencapai target pada misi 1 (satu) adalah Menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis Aparatur yang berwibawa (Good Government) serta otonomi khusus yang efektif.

Strategi yang direncanakan tahun 2017-2022 yaitu melalui :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Arah Kebijakan yang menunjang strategi diatas adalah :

- 1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur
- 4) Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 5) Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD

2. Dinas Kesehatan sebagaimana yang diamanatkan pada Misi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Dibidang Pendidikan dan Kesehatan, maka ada 4 strategi yang direncanakan melalui :
- a. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- 1) Program Peningkatan Informasi Kesehatan
  - 2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
  - 3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
  - 4) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
  - 5) Program Pembagian Gizi Masyarakat
  - 6) Program Kesehatan Penduduk Usia Produktif
  - 7) Program Kesehatan Lansia
  - 8) Program Keluarga Sehat
  - 9) Program Kesehatan Lingkungan
  - 10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 11) Program Kemitraan Kesehatan dengan Lembaga Agama, Lembaga Adat, dan Lembaga Masyarakat
  - 12) Program Rujukan Masyarakat Bagi OAP
  - 13) Program Jaminan Masyarakat
  - 14) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - 15) Program Upaya Kesehatan Dasar di Lingkungan Kantor Gubernur Papua Barat
  - 16) Program Kesehatan Kerja
  - 17) Program Kesehatan Olahraga
  - 18) Program Kesehatan Haji

- b. Meningkatkan Akses dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas dan Merata
- 1) Program Akreditasi Puskesmas
  - 2) Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit Rujukan
  - 3) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
  - 4) Program Obat Perbekalan Kesehatan
  - 5) Program Pengembangan Obat asli Indonesia
  - 6) Program Peralatan Kesehatan Penunjang Pelayanan Kesehatan
  - 7) Program Kesehatan Pelayanan Daerah di UTD dan BDRS
- c. Meningkatkan Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan Yang Berkualitas
- 1) Program Perencanaan dan Pemdayagunaan
  - 2) Program Pengiriman dan Pendisiplinan Tenaga Kesehatan ke Distrik, Kampung Terpencil dan Terisolir
  - 3) Program Pendidikan dan Pelatihan
  - 4) Program Registrasi dan Akreditasi
- d. Meningkatkan Pengendalian Penyakit, Krisis Kesehatan dan Bencana
- 1) Program Penanggulangan HIV/AIDS
  - 2) Program Imunisasi
  - 3) Program Penanggulangan Penyakit Malaria
  - 4) Program Penanggulangan Penyakit DBD
  - 5) Program Penjaringan Kasus TB(+) dan Pelayanan Kesehatan
  - 6) Program Penanggulangan Bidang Kesehatan
  - 7) Program Penanggulangan Hipertensi
  - 8) Program Penanggulangan Penderita Diabetes Melitus
  - 9) Program Kesehatan Jiwa
  - 10) Program Penanggulangan Penyakit Kusta
  - 11) Program Pengendalian Penyakit Filariasis
  - 12) Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Tidak Menular

- 13) Program Penanggulangan ISPA
- 14) Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Frambusia
- 15) Program Penanggulangan Diare
- 16) Program Kesehatan Indra

Arah Kebijakan yang Menunjang Strategi Misi 2 adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
  - 1) Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Profil Kesehatan setiap tahunnya
  - 2) Menurunkan Angka Kematian Ibu OAP Menjadi 23 Kelahiran Hidup
  - 3) Menurunkan Angka Kematian Bayi OAP menjadi 16 per Kelahiran Hidup
  - 4) Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/kota
  - 5) Cakupan Balita OAP Gizi Buruk Mendapat Perawatan
  - 6) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/kota
  - 7) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Kabupaten/kota
  - 8) Persentase Kab/kota yang melaksanakan Keluarga Sehat
  - 9) Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat
  - 10) Persentase Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Hidup Sehat
  - 11) Persentase Kemitraan Kesehatan Terhadap Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Kemasyarakatan
  - 12) Persentase Pasien Masyarakat OAP Sakit Berat di Rujuk
  - 13) Persentase Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)
  - 14) Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 25% fasilitas pelayanan kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas

- 15) Persentase Pelayanan Kesehatan Yang dilaksanakan dilingkungan kantor Gubernur Papua Barat
  - 16) Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja
  - 17) Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Olah Raga
  - 18) Angka kematian calon jemaah haji < 2 per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji sampai tahun 1443H / 2022M
- b. Meningkatkan Akses dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas dan Merata
- 1) Cakupan Puskesmas Terakreditasi di Distrik
  - 2) Jumlah Rumah Sakit Rujukan
  - 3) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
  - 4) Persentase ketersediaan obat dan vaksin
  - 5) Jumlah Tanaman Obat Asli Papua Yang terdata
  - 6) Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar
  - 7) Cakupan Sarana dan Prasarana UTD dan BDRS Tingkat Provinsi
- c. Meningkatkan Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan Yang Berkualitas
- 1) Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk
  - 2) Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan
  - 3) Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan
  - 4) Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi
- d. Meningkatkan Pengendalian Penyakit, Krisis Kesehatan dan Bencana
- 1) Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022
  - 2) Pencapaian Uci desa
  - 3) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria
  - 4) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

- 5) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
- 6) Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan
- 7) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota
- 8) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota
- 9) Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota
- 10) Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta
- 11) Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis
- 12) Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM
- 13) Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota
- 14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia
- 15) Cakupan Penanggulangan Diare
- 16) Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan yankes indera sesuai standar.

VISI : Menuju Papua Barat Yang aman Sejahtera dan Bermartabat

Misi I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis Aparatur yang berwibawa serta otonomi khusus yang efektif

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan OPD		
1.1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan APBD	Urusan Wajib Kesehatan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Penyediaan jasa surat menyurat	1.1 Tersedianya layanan jasa pos sesuai rencana kebutuhannya
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik selama 1 tahun
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.3 Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhannya
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.4 Tersedianya jasa Administrasi Keuangan
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.5 Tersedianya Jasa Kebersihan kantor
		Penyediaan alat tulis kantor	1.6 Tersedianya Alat Tulis Kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.7 Tersedianya Barang cetak dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.8 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.9 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan makanan dan minuman	1.10 Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan penunjang lainnya
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.11 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
		Pemutakhiran Data Program dan Kepegawaian	1.12 Tersedianya struktur Dinkes sesuai kebutuhan daerah
		Penyediaan Jasa Pengelola Website	1.13 Tersediannya jasa pengelola Web Site
		Penyediaan Jasa Pengelola data dan Informasi Kesehatan	1.14 Tersediannya Jasa pengelola data Informasi Kesehatan
1.2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.1 Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
		Pengadaan peralatan gedung kantor	2.2 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.3 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.4 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.5 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
		Pembangunan Gedung Kantor	2.6 Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor
		Pembangunan/Penataan Halaman Gudang Perbekalan Kesehatan	2.7 Terlaksananya Pembangunan/Penataan Halaman Gudang Perbekalan Kesehatan
		Pembangunan Gedung BAPELKES	2.8 Terlaksananya Pembangunan Gedung BAPELKES
1.3	Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	3 Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.1 Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	3.2 Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	3.3 Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4 Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur
		Pendidikan dan pelatihan formal	4.1 Jumlah Pegawai yg kompeten sesuai materi Pendidikan dan pelatihan formalnya
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4.2 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4.3 Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
		Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	4.4 Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan
1.4	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja SKPD
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP OPD)	5.1 Paket laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sesuai ketentuan yang berlaku
		Penyusunan Renca Kerja (Tahunan)	5.2 Dokumen Renja dan LKPD yang tepat syarat dan Waktu
		Penyusunan RKA dan DPA OPD	5.3 Dokumen RKA dan DPA yang tepat syarat dan Waktu
		Penyusunan laporan keuangan semesteran dan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.4 Laporan keuangan semesteran dan pelaporan prognosis realisasi anggaran yang tepat syarat dan Waktu
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun (LKPD OPD)	5.5 Laporan keuangan OPD akhir Tahun yang tepat Syarat dan waktu
		Pelaporan Administrasi Kepegawaian	5.6 Laporan SKP PNS dan Laporan Administrasi dan Profil Kepegawaian Lingkup OPD
		Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Data Dasar Puskesmas Kab/Kota se Papua Barat	6.1 Terkumpul dan Termutakhirnya Data dan Tersusunnya Data Dasar Puskesmas Kab/Kota Se Papua Barat
		Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	6.2 Terkumpul dan Termutakhirnya Data Profil Kesehatan Provinsi
		Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	6.3 Terlaksananya koordinasi teknis Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan
		Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.4 Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		Rapat Kerja Kesehatan Daerah	6.6 Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah
		Hari Kesehatan Nasional	6.7 Terlaksananya Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Papua Barat

Visi

Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan Kesehatan

Tujuan		Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan ( Output)
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan			
		2.1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Logistik Program	26.1 Ketersediaan Obat dan Vaksin
			Distribusi Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Logistik Program ke Kabupaten/Kota	26.2 Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang terlayani sesuai dengan permintaan/ kebutuhan dan atau alokasi pengelola program
			Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian	26.3 Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas pengelola obat
			Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	26.4 Terlaksananya Evaluasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dasar dan Program
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 25% fasilitas pelayanan kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas
			Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat (Mobile Klinik)	19.1 Jumlah paket pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan
			Peningkatan Kapasitas Perawat tentang Pertolongan Pertama Gawat Darurat	19.2 Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan
			Workshop Keselamatan Pasien	19.3 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti workshop Keselamatan Pasien
			Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen	19.4 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti workshop Internal dan Tinjauan Manajemen
			Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	10.1 Jumlah dokumen yang dihasilkan
			Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat	10.2 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan
			Kampanye Sadar Gizi	Jumlah paket kegiatan kampanye
			Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Penggunaan Standar Pemantauan dan Pertumbuhan Balita	10.3 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Konseling Pemberian ASI	10.4 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Surveilans Penentuan Status Gizi	10.5 Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan surveilans
			Pelacakan Kasus Gizi Buruk	10.6 Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pelacakan
			Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk	10.7 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Pengadaan Bangunan dan Fasilitas TFC (Therapeutic Feeding Center)	10.8 Jumlah bangunan dan fasilitas TFC yang dapat disediakan
			Penyediaan logistik penunjang program gizi	10.9 Jumlah paket logistik penunjang program gizi yang dapat disediakan
				Persentase Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)
			Sosialisasi dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi	18.1 Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Pertemuan Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi I	18.2 Tersedia 1 laporan jumlah kepesertaan JKN
			Pertemuan Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi II	18.3 Tersedia 1 laporan jumlah kepesertaan JKN
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Bagi FKTP di Provinsi Papua Barat	18.4 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Bimtek dan Monev Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	18.5 Tersedia 13 laporan bimtek dan monev
			Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi	18.6 Tersedia 1 laporan pelaksanaan JKN
				Persentase Kemitraan Kesehatan Terhadap Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Kemasyarakatan
			Rapat koordinasi penyelenggaraan program kemitraan kesehatan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat	16.1 Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
				Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	14.1 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
			Pemberdayaan penyediaan sarana dan sanitasi dasar	14.2 Tersedianya sarana air minum dan sanitasi dasar oleh masyarakat hasil dari pemberdayaan
			Peningkatan kualitas stakeholder dari lintas sektor tetang strategi menuju pasar tradisional yang sehat	14.3 Tersedianya stakeholder dan lintas sektor yang berwawasan pasar tradisional sehat
			Pelatihan /refreshing pengelola program kesehatan lingkungan	14.4 Meningkatnya tenaga kesehatan lingkungan yang terlatih
			Peretemuan evaluasi program penyehatan pangan	14.5 Meningkatnya presentase tempat pengelolaa makanan yang memenuhi syrat kesehatan
			Bimbingan Teknis Program Kesehatan lingkungan	14.6 Meningkatnya presentase tempat pengelolaa makanan yang memenuhi syrat kesehatan
			Pertemuan program evaluasi STBM	14.7 Meningkatnya jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM
				Persentase Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Hidup Sehat
			Pelatihan Untuk Pelatih Keluarga Sehat	13.1 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan untuk pelatih
			Koordinasi dan Bimbingan Keluarga Sehat Kab/Kota	13.2 Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
				Menurunkan Angka Kematian Bayi menjadi < 10 per Kelahiran Hidup
			Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	8.1 Terlaksananya Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
			Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Pelayanan Neonatal	8.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Neonatal
			Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia	8.3 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan

			Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	8.4	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan
			Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	8.5	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan
			Orientasi dan Sosialisasi Manajemen Terpadu Balita Sakit Masyarakat (MTBS-M)	8.6	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan
			Pelatihan Dokter Umum tentang Pelayanan Kesehatan Anak	8.7	Jumlah Dokter Umum Yang Mengikuti Pelatihan
			Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Penanganan Intelligensia Bayi	8.8	Jumlah Dokter Umum Yang Mengikuti Pelatihan
			Pelatihan Guru PAUD tentang Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	8.9	Jumlah Guru PAUD Yang Mengikuti Pelatihan
			Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	8.10	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan
			Penyediaan Paket Penunjang Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	8.11	Jumlah Paket Fasilitas Pelayanan yang dapat disediakan
					Persentase Kab/Kota yang Memiliki Profil Kesehatan Setiap Tahunnya
			Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	6.2	Terumpul dan Termutakhirnya Data Profil Kesehatan Provinsi
					Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan
			Advokasi tentang Pembentukan Team Gerak Cepat tingkat kab/kota	39.1	Terbentuknya Tim reaksi cepat/ RHA dan Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Pelatihan Peningkatan kapasitas petugas Team gerak cepat	39.2	Peningkatan kapasitas petugas Team Gerak Cepat (TGC)
			Pengelolaan Data dan Informasi PKK	39.3	Terbentuknya Pengelolaan Data dan Informasi PKK
					Menurunkan Angka Kematian Ibu menjadi < 50 Kelahiran Hidup
			Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Penguatan Pelayanan Antenatal Terpadu dan Kesehatan Reproduksi	9.1	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan
			Pelatihan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA)	9.2	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan
			Pelatihan Kelas Ibu Hamil	9.3	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan
			Orientasi Supervisi Fasilitatif	9.4	Jumlah Bidan Koordinator yang mengikuti orientasi
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Antenatal Terpadu	9.5	Jumlah Paket Fasilitas Pelayanan yang dapat disediakan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/kota
			Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	10.1	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA)	10.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Penjarangan Kesehatan Anak Sekolah	10.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Sosialisasi Pembinaan UKS pada Anak dengan Kebutuhan Khusus	10.4	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
			Forum Komunikasi Jejaring Kemitraan Pembinaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	10.5	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan
			Forum Komunikasi Perlindungan Kesehatan Anak	10.6	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan
			Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	10.7	Jumlah dokumen yang dihasilkan
			Penyediaan Paket Penunjang Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	10.8	Jumlah paket penunjang berupa UKS Kit yang dapat disediakan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/kota
			Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif	11.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Kabupaten/kota
			Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	12.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	12.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Pengadaan Lansia KIT	12.3	Jumlah Lansia Kit yang dapat disediakan
					Persentase Kab/kota yang melaksanakan Keluarga Sehat
			Koordinasi dan Bimbingan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	13.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Peningkatan Kualitas tenaga promosi kesehatan diberbagai jenjang	13.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Pengadaan sarana dan prasarana promosi kesehatan daerah	13.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan yang dapat disediakan
					Persentase Pelayanan Kesehatan Yang dilaksanakan dilingkungan kantor Gubernur Papua Barat
			Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat sekitar kantor gubernur Papua Barat	14.1	Jumlah paket pelayanan kesehatan yang dilaksanakan
			Penyediaan Logistik Pelayanan Kesehatan Dasar Klinik Kantor Gubernur Papua Barat	14.2	Jumlah paket logistik pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan
			Sosialisasi Pencegahan dan pemeliharaan penyakit kronis	14.3	Jumlah pertemuan sosialisasi yang dilakukan
					Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja
			Rapat koordinasi penyelenggaraan program kesehatan Kerja	15.1	Tersosialisasinya program kesehatan kerja
			Pelatihan tenaga Pengelola Program Kesehatan Kerja	15.2	Terlaksananya kegiatan program kesehatan kerja di kab/kota
					Cakupan Puskesmas Terakreditasi di Distrik
		2.2	Meningkatkan Akses dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas dan Merata		
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas		
			Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Akreditasi Puskesmas	23.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Pelatihan tenaga Pengelola Akreditasi Puskesmas	23.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan Puskesmas

			Bimtek dan Monev Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	23.3	Tersedia 13 laporan bimtek dan monev
			Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Puskesmas Terintegrasi dengan Pendekatan Keluarga	23.4	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit Rujukan		Jumlah Rumah Sakit Rujukan
			Pertemuan Jejaring Rumah Sakit se-Papua Barat I	24.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Pertemuan Jejaring Rumah Sakit se-Papua Barat II	24.2	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Coder dan Administrasi INA CBG's Bagi Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat	24.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Pembangunan Rumah Sakit	25.1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Secara Bertahap
			Registrasi Rumah Sakit	25.2	Terlaksananya Registrasi Rumah Sakit Provinsi
			Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran / Laboratorium Rumah Sakit	25.3	Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium Rumah Sakit
					Cakupan Sarana dan Prasarana UTD dan BDRS Tingkat Provinsi
			Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Darah	29.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Pelatihan Tenaga Dokter dalam Pelayanan Darah di UTD dan BDRS	29.2	Jumlah tenaga dokter yang mengikuti pelatihan
			Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Darah di UTD dan BDRS	29.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
			Sarana dan Prasarana UTD Tingkat Provinsi	29.4	Tersedianya Sarana dan Prasarana UTD Tingkat Provinsi
			Program Rujukan kesehatan bagi orang Papua		Persentase Pasien Masyarakat OAP Sakit Berat di Rujuk
			Rujukan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua	17.1	Tersedianya Akses Rujukan Kesehatan Bagi Orang Papua
			Operasional Program Rujukan Bagi Orang Asli Papua	17.2	Terbiayainya Operasional Program Rujukan bagi Orang Asli Papua
			Sosialisasi Rujukan Kesehatan Bagi Orang Papua tingkat Provinsi	17.3	Peningkatan pemahaman regulasi program
			Program Pengiriman dan Disiplinasi Tenaga Kesehatan ke Distrik, Kampung Terpencil dan Terisolir		Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan
			Menempatkan Tenaga Kesehatan Strategis pada daerah perbatasan	31.1	Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan
			Menempatkan Bidan Desa pada daerah terisolir	31.2	Jumlah Bidan yang ditempatkan
			Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Tenaga Kesehatan	31.3	Tersedia 13 laporan monev keberadaan Tenaga Kesehatan Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk
			Pembinaan, Pengembangan dan Pengkajian Pendayagunaan SDM Kesehatan	30.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Monitoring dan Evaluasi Data SDM Kesehatan	30.2	Tersedia 13 laporan monev Data SDM Kesehatan Pencapaian Uci desa
			Program Imunisasi		
			Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi	35.1	Jumlah dinas kesehatan yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan imunisasi
			Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Komda KIP	35.2	Jumlah kab/kota yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan KIP
			Pelacakan kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) dan pengambilan spesimen AFP	35.3	Ditemukan adanya kasus AFP
			Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam Penanganan KLB PD3I dan PIE	35.4	Meningkatnya pengetahuan tentang penanggulangan KLB PD3I dan PIE
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	45	Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM
			Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	45.1	Terdapat jumlah petugas yang terlatih untuk Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
			Sosialisasi penanggulangan penyakit tidak menular	45.2	Terdapat jumlah petugas yang terlatih dalam penanggulangan penyakit tidak menular
			Pembentukan Posbindu	45.3	Terbentuknya Posbindu di semua Kabupaten/Kota
			Melaksanakan advokasi	45.4	Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota
			Peningkatan kapasitas tenaga pengelola penderita Hipertensi	40.1	Adanya keperluan petugas dalam pengelolaan program penderita hipertensi di kab/kota Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota
			Peningkatan kapasitas tenaga pengelola penderita DM	41.1	Adanya keperluan petugas dalam pengelolaan program penderita DM di kab/kota
			Program Kesehatan Haji		Angka kematian calon jemaah haji < 2 per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji sampai tahun 1443H / 2022M
			Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Haji	22.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Pelatihan Tim Pemeriksa Kesehatan Haji	22.2	Jumlah tenaga Tim Pemeriksa Kesehatan Haji yang mengikuti pelatihan
			Penyediaan Logistik Pelayanan Kesehatan Haji	22.3	Jumlah paket logistik pelayanan kesehatan haji yang tersedia di Kabupaten/Kota
			Pendampingan Calon Jamaah Haji selama di Embarkasi	22.4	Terpantaunya kondisi kesehatan calon jemaah haji
			Program Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer		Jumlah Tanaman Obat Asli Papua Yang terdata
			Pendataan dan pembinaan tanaman obat asli Papua	27.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Program Kesehatan Jiwa		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota
			Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Jiwa	42.1	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan

			Study Banding Pelayanan Kesehatan Jiwa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Bogor	42.2	Jumlah dokumen konsultasi teknis ke Pusat yang dihasilkan
			Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Keswa-Napza	42.3	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Program Kesehatan Indra		Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan
			Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Indera	49.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Pelatihan pemeriksaan kesehatan indera	49.2	Terlatihnya petugas kesehatan indera pada FKTP
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022
			Pelatihan manajemen HIV Komprehensif	34.1	Terlatihnya tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat
			Peningkatan Penemuan Kasus Baru HIV Positif (OAP)	34.2	Ditemukan dan dilayannya seluruh penderita HIV Khususnya (OAP) sesuai standar
			Cakupan Penanggulangan Diare		
			Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Diare	48.1	Terdapatnya kesepakatan dalam melaksanakan rencana tindak lanjut.
			Peningkatan Kapasitas Sistem Kewaspadaan dini dan Penanggulangan KLB Diare, Hepatitis dan ISP	48.2	Peningkatan Kapasitas Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB Diare, Hepatitis, ISP
			Penanggulangan KLB Diare, Hepatitis dan ISP	48.3	Tertanggulangnya KLB Diare, Hepatitis, ISP
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia
			Pelatihan pemegang program	47.1	Terdapatnya petugas frambusia yang terlatih
			Penemuan kasus	47.2	Meningkatnya Jumlah kasus baru frambusia yang ditemukan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota
			Peningkatan kapasitas tenaga pengelola ISPA Kabupaten	46.1	Adanya keperluan petugas dalam pengelolaan program ISPA di kab/kota
					Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta
			Leprosy Day	43.1	Mensosialisasikan Kusta pada masyarakat
			Pelatihan Kusta bagi Tenaga Kesehatan di Kab/ Kota	43.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
					Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis
			Peningkatan kapasitas Petugas	44.1	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Petugas
			Pencanangan Bulan Eliminasi kaki Gajah	44.2	Terlaksananya gerakan Bulan Eliminasi kaki Gajah
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria
			Pelatihan dasar pengendalian vektor/ entomologi	36.1	Terdapatnya tenaga Entomologi yang terlatih di puskesmas
			Pelatihan / Refreshing training tatalaksana kasus malaria bagi dokter , perawat , bidan	36.2	Meningkatnya Jumlah dokter ,Perawat ,bidan yang terlatih
			Pelatihan / Refreshing training tatalaksana kasus malaria bagi dokter , perawat , bidan	36.3	Meningkatnya Jumlah dokter , Perawat , Bidan yang terlatih
			Pelatihan mikroskopis bagi croschecker provinsi dan kabupaten/kota	36.4	Meningkatnya Jumlah Crosschecker malaria yang terlatih
			Pelatihan tatalaksana kasus malaria bagi tenaga mikroskopis malaria	36.5	Meningkatnya Jumlah mikroskopist yang dilatih
			Pelatihan tenaga surveillance kabupaten dan provinsi	36.6	Tersedianya tenaga surveilans malaria yang terlatih
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
			Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan penanggulangan KLB	37.1	Terbentuknya Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan penanggulangan KLB
			Pertemuan Penyusunan kebijakan program DBD	37.2	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
			Pelatihan Hospital DOTS Linkage	38.1	Meningkatnya kemampuan Tim DOTS RS
			Workshop Manajemen TB Tingkat Provinsi	38.2	Meningkatnya kemampuan Tim Manajemen TB Tingkat Provinsi
			Supervisi / Bimtek ke fasilitas pelayanan kesehatan	38.3	Meningkatnya kualitas di fasilitas pelayanan kesehatan
			Program Registrasi dan Akreditasi		Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi
			Sosialisasi, koordinasi dan penguatan jejaring kerja MTKP	33.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan
			Melaksanakan sertifikasi dan proses registrasi	33.2	Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi
					Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam perencanaan pembangunan kesehatan
			Seleksi dan pengiriman tenaga kesehatan teladan	30.3	Jumlah tenaga kesehatan yang dihasilkan
					Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan
			Pelatihan fungsional dan manajemen Kesehatan	32.1	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional dan manajemen
			Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan	32.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik	33.3	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti peningkatan kapasitas
					Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam pelayanan rujukan
			Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis (OAP) RS Rujukan Papua Barat	33.4	Jumlah Dokter Spesialis (OAP) yang mengikuti pendidikan
			Pendidikan Apoteker Khusus Orang Asli papua di Fasyankes	33.5	Jumlah Orang Asli Papua yang mengikuti Pendidikan Apoteker di Fasyankes
			Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit PKS Jamkesmas		Cakupan jumlah rumah sakit PKS Jamkesmas

BAB. VI

RENCANA PROGRAM  
KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagai diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022. Program-program tersebut dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Program Wajib dan Program Teknis.

#### A. Program-program Wajib

Program Wajib terdiri dari 5 (lima) Program yaitu : 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran, 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3. Program Peningkatan Displin Aparatur, 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program-program Wajib ini bertujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan OPD, terutama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Papua Barat.

Berikut sasaran yang harus dicapai pada program-program wajib diatas :

#### 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

##### a. Sasaran

Meningkatnya Efisiensi dan efektivitas Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

##### b. Kegiatan Pokok

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10) Penyediaan makanan dan minuman
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 12) Pemutakhiran Data Program dan Kepegawaian
- 13) Penyediaan Jasa Pengelola Website
- 14) Penyediaan Jasa Pengelola data dan Informasi Kesehatan

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

### a. Sasaran

Meningkatkan ketersediaanya sarana dan prasarana aparatur, terutama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Papua Barat.

### b. Kegiatan Pokok

- 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 6) Pembangunan Gedung Kantor
- 7) Pembangunan/Penataan Halaman Gudang Perbekalan Kesehatan
- 8) Pembangunan Gedung BAPELKES

## 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

### a. Sasaran

Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

### b. Kegiatan Pokok

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 2) Pengadaan pakaian kerja lapangan
- 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Sasaran  
Meningkatnya kemampuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur bidang kesehatan.
  - b. Kegiatan Pokok
    - 1) Pendidikan dan pelatihan formal
    - 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
    - 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
    - 4) Penyusunan Peraturan Daerah di Bidang Kesehatan
  
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  - a. Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - b. Kegiatan Pokok
    - 1) Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
    - 2) Penyusunan Renja (Rencana Kerja) Tahunan
    - 3) Penyusunan RKA dan DPA OPD
    - 4) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan pelaporan prognosis realisasi anggaran
    - 5) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (LKPD OPD)
    - 6) Pelaporan Administrasi Kepegawaian
    - 7) Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Data Dasar Puskesmas Kabupate/Kota Se-Papua Barat.
    - 8) Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi.
    - 9) Rapat koordinasi Khusus Bidang Kesehatan
    - 10) Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
    - 11) Penyusunan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Provinsi Papua Barat
    - 12) Rapat Kerja Kesehatan Daerah
    - 13) Hari Kesehatan Nasional

## B. Program-Program Teknis

Program-program Teknis ini bertujuan untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta memiliki 2 sasaran yaitu Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Merata.

- I. Program-program dengan sasaran meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :
  1. Program Perbekalan Obat dan Kesehatan, dengan indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2022 adalah ketersediaan obat dan vaksin
  2. Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2022 adalah
    - 1) Presentase kabupaten/kota yang minimal 25% fasilitas pelayanan dasar kesehatannya dapat memberikan pelayanan dasar berkualitas
    - 2) Cakupan balita gizi buruk OAP mendapatkan perawatan
    - 3) Presentase penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN atau KIS
    - 4) Presentase kemitraan kesehatan terhadap Lembaga adat, Lembaga agama dan Lembaga kemasyarakatan
    - 5) Jumlah kabupaten/kota sehat
    - 6) Presentase kabupaten/kota yang melaksanakan hidup sehat
    - 7) Menurunkan angka kematian OAP menjadi < 10 perkelahiran hidup
    - 8) Presentase kabupaten/kota yang memiliki profil kesehatan tiap tahunnya
    - 9) Presentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan
    - 10) Menurunkan angka kematian ibu OAP menjadi < 50 per kelahiran hidup

- 11) Cakupan pelayanan kesehatan anak diusia Pendidikan dasar kabupaten/kota
  - 12) Cakupan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif di kabupaten/kota
  - 13) Cakupan pelayanan kesehatan penduduk usia lanjut kabupaten/kota
  - 14) Presentase kabupaten/kota yang melaksanakan hidup sehat
  - 15) Presentase pelayanan yang dilaksanakan dilingkungan kantor gubernur papua barat
  - 16) Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja
3. Program teknis dengan sasaran meningkatkan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata adalah sebagai berikut :
- 1). Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan indicator sebagai berikut :
    - 1) Cakupan puskesmas terakreditasi di distrik
    - 2) Persentase alat kesehatan yang digunakan sesuai standar.
  - 2). Program Peningkatan jumlah Rumah Sakit Rujukan dengan indicator sebagai berikut :
    - a. Jumlah Rumah Sakit Rujukan
    - b. Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk
  - 3). Program Rujukan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua dengan indikator Persentase Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dirujuk.
  - 4). Program Pengiriman dan Pendisiplinan Tenaga Kesehatan di Distrik, Kampung Terpencil dan Terisolir dengan indicator sebagai berikut :
    - a. Jumlah tenaga kesehatan bidan/bidan desa Orang Asli Papua (OAP) yang ditempatkan;
    - b. Rasio Tenaga Kesehatan Dokter, Tenaga Medis per satuan Penduduk.

- 5). Program Imunisasi dengan indikator Pencapaian UCI Desa.
- 6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dengan indikator sebagai berikut :
  - a. Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM.
  - b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota
  - c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota.
- 7). Program Kesehatan Haji dengan indicator Angka kematian calon jemaah haji  $< 2$  per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji sampai tahun 1443H / 2022M.
- 8). Program Kesehatan Tradisioanl, Alternatif dan Komplementer dengan indicator adalah Jumlah Tanaman Obat Asli Papua Yang terdata.
- 9). Program Kesehatan Jiwa dengan indicator Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota
- 10). Program Kesehatan Indra dengan indicator Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan yankes indera sesuai stand.
- 11). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan indicator sebagai berikut :
  - a. Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi  $< 1,5\%$  pada tahun 2022.
  - b. Cakupan Penanggulangan Diare.
  - c. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia.
  - d. Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota
  - c. Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta
  - d. Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis

- e. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria.
  - f. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.
  - g. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA.
- 12). Program Registrasi dan Akreditasi dengan indicator sebagai berikut :
- a. Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi
  - b. Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam perencanaan pembangunan kesehatan
  - c. Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan
  - d. Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam pelayanan rujukan.
- 13). Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit PKS Jamkesmas dengan indicator penunjang berupa Cakupan Jumlah Rumah Sakit PKS Jamkesmas.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan  
Provinsi Papua Barat

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra perangkat Daerah		OPD Penanggungjawab		
			Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Target	Rp.			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
2.1.1.	Urusan Wajib Kesehatan																
2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.630.749.828	100%	6.829.672.323	100%	7.034.562.492	100%	7.245.599.367	100%	7.462.967.348	100%	35.203.551.358	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.1 Tersedianya layanan jasa pos sesuai rencana kebutuhannya	12 Laporan	24.000.000	12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	33.599.367	12 Laporan	35.000.000	5 Dokumen	148.599.367	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik selama 1 tahun	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.100.000.000	1 Paket	1.150.000.000	1 Paket	1.160.000.000	1 Paket	1.190.000.000	5 Dokumen	5.600.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.3 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhannya	12 laporan	45.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	57.000.000	12 laporan	65.000.000	12 laporan	70.000.000	5 Dokumen	292.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.4 Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	12 laporan	1.700.000.000	12 laporan	1.620.000.000	12 laporan	1.625.000.000	12 laporan	1.700.000.000	12 laporan	1.750.000.000	5 Dokumen	8.395.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.5 Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	12 laporan	290.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	275.000.000	12 laporan	350.000.000	12 laporan	355.000.000	5 Dokumen	1.520.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan alat tulis kantor	1.6 Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 laporan	200.000.000	12 laporan	220.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	257.000.000	5 Dokumen	1.177.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.7 Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	12 laporan	200.000.000	12 laporan	220.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	257.000.000	5 Dokumen	1.177.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.8 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	53.149.828	1 Paket	50.000.000	1 Paket	52.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	63.967.348	5 Dokumen	274.117.176	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.9 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	450.000.000	5 Paket	2.450.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan makanan dan minuman	1.10 Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan penunjang lainnya	12 Laporan	183.600.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	230.000.000	12 Laporan	245.000.000	12 Laporan	250.000.000	5 Dokumen	1.108.600.000	Dinas Kesehatan		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.11 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	2.100.000.000	12 Laporan	2.110.000.000	12 Laporan	2.115.000.000	12 Laporan	2.200.000.000	5 Dokumen	10.525.000.000	Dinas Kesehatan		
	Pemutakhiran Data Program dan Kepegawaian	1.12 Tersedianya struktur Dinkes sesuai kebutuhan daerah	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	351.000.000	12 Laporan	352.000.000	12 Laporan	350.000.000	5 Dokumen	1.703.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan Jasa Pengelola Website	1.13 Tersedianya jasa pengelola Web Site	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.672.323	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	160.000.000	5 Dokumen	545.672.323	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan Jasa Pengelola data dan Informasi Kesehatan	1.14 Tersedianya Jasa pengelola data dan Informasi Kesehatan	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	46.000.000	12 Laporan	59.562.492	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	75.000.000	5 Dokumen	287.562.492	Dinas Kesehatan		
2.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	12 100%	2.553.600.000	12 100%	2.630.208.000	12 100%	2.709.114.240	12 100%	2.790.387.667	12 100%	2.874.099.297	100%	13.557.409.204	Dinas Kesehatan		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.1 Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	1 Paket	230.000.000	1 Paket	235.000.000	1 Paket	600.000.000	5 Paket	1.485.000.000	Dinas Kesehatan		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	2.2 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	260.000.000	1 Paket	265.000.000	1 Paket	600.000.000	5 Paket	1.625.000.000	Dinas Kesehatan		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.3 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Paket	750.000.000	1 Paket	770.000.000	1 Paket	800.000.000	1 Paket	850.000.000	1 Paket	1.300.000.000	5 Paket	4.470.000.000	Dinas Kesehatan		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.4 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	260.000.000	1 Paket	160.000.000	5 Paket	1.170.000.000	Dinas Kesehatan		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.5 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	72.000.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	73.000.000	1 Paket	160.000.000	5 Paket	449.000.000	Dinas Kesehatan		
	Pembangunan Gedung Kantor	2.6 Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	570.000.000	5 Paket	570.000.000	Dinas Kesehatan		
	Pembangunan/Perbaikan Halaman Gudang Perbekalan Kesehatan	2.7 Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan Halaman Gudang Perbekalan Kesehatan	1 Paket	582.200.000	1 Paket	618.808.000	1 Paket	647.714.240	1 Paket	650.714.240	1 Paket	1.200.000.000	5 Paket	3.699.436.480	Dinas Kesehatan		
	Pembangunan Gedung BAPELKES	2.8 Terlaksananya Pembangunan Gedung BAPELKES	1 Paket	449.400.000	1 Paket	449.400.000	1 Paket	449.400.000	1 Paket	456.673.427	1 Paket	700.000.000	5 Paket	2.504.873.427	Dinas Kesehatan		
2.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	3 Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	1 100%	500.000.000	1 100%	515.000.000	1 100%	530.450.000	1 100%	546.363.500	1 100%	562.754.405	100%	2.654.567.905	Dinas Kesehatan		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.1 Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	170.000.000	1 Paket	175.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	185.913.500	1 Paket	190.390.905	5 Paket	901.304.405	Dinas Kesehatan		
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	3.2 Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket	160.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	170.450.000	1 Paket	176.450.000	1 Paket	184.450.000	5 Paket	856.350.000	Dinas Kesehatan		
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	3.3 Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu	1 Paket	170.000.000	1 Paket	175.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	184.000.000	1 Paket	187.913.500	5 Paket	896.913.500	Dinas Kesehatan		
2.1.1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4 Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	4 100%	500.000.000	4 100%	515.000.000	4 100%	530.450.000	4 100%	546.363.500	4 100%	562.754.405	100%	2.654.567.905	Dinas Kesehatan		
	Pendidikan dan pelatihan formal	4.1 Jumlah Pegawai yg kompeten sesuai materi Pendidikan dan pelatihan formalnya	4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang		20 Orang		Dinas Kesehatan		
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4.2 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Orang		Dinas Kesehatan		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4.3 Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Orang		Dinas Kesehatan		
	Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	4.4 Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Orang		Dinas Kesehatan		
2.1.1.5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja SKPD	1 100%	4.064.412.960	1 100%	4.186.345.349	1 100%	4.311.935.709	1 100%	4.441.293.781	1 100%	4.574.532.594	100%	21.578.520.393	Dinas Kesehatan		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP OPD)	5.1 Paket laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sesuai ketentuan yang berlaku	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	65.000.000	5 Laporan	270.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyusunan Renca Kerja (Tahunan)	5.2 Dokumen Renca dan LKPD yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	70.000.000	5 Laporan	275.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyusunan RKA dan DPA OPD	5.3 Dokumen RKA dan DPA yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	5 Laporan	210.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.4 Laporan keuangan semesteran dan pelaporan prognosis realisasi anggaran yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	195.000.000	Dinas Kesehatan		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun (LKPD OPD)	5.5 Laporan keuangan OPD akhir Tahun yang tepat Syarat dan waktu	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	65.000.000	5 Laporan	270.000.000	Dinas Kesehatan		
	Pelaporan Administrasi Kepegawaian	5.6 Laporan SKP PNS dan Laporan Administrasi dan Profil Kepegawaian Lingkup OPD	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	255.000.000	Dinas Kesehatan		
	Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Data Dasar Puskesmas Kab/Kota se Papua Barat	6.1 Terkumpul dan Termutakhirnya Data dan Tersusunnya Data Dasar Puskesmas Kab/Kota se Papua Barat	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	355.000.000	1 Laporan	360.000.000	5 Dokumen	1.765.000.000	Dinas Kesehatan		
	Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	6.2 Terkumpul dan Termutakhirnya Data Profil Kesehatan Provinsi	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	535.000.000	1 Laporan	550.000.000	5 Dokumen	2.585.000.000	Dinas Kesehatan		
	Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	6.3 Terlaksananya koordinasi teknis Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	355.000.000	1 Laporan	355.000.000	5 Dokumen	1.760.000.000	Dinas Kesehatan		
	Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.4 Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	450.000.000	5 Dokumen	1.900.000.000	Dinas Kesehatan		
	Rapat Kerja Kesehatan Daerah	6.6 Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah	1 Laporan	2.000.000.000	1 Laporan	2.121.932.389	1 Laporan	2.247.522.749	1 Laporan	2.251.293.781	1 Laporan	2.261.532.594	5 Dokumen	10.882.281.513	Dinas Kesehatan		
	Hari Kesehatan Nasional	6.7 Terlaksananya Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Papua Barat	1 Laporan	239.412.960	1 Laporan	239.412.960	1 Laporan	239.412.960	1 Laporan	240.000.000	1 Laporan	253.000.000	5 Dokumen	1.211.238.880	Dinas Kesehatan		
2.1.1.6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	1 100%	14.284.586.809	1 100%	17.141.504.171	1 100%	20.569.805.005	1 100%	24.683.766.006	1 100%	29.620.519.208	100%	106.300.181.199	Dinas Kesehatan		

	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Logistik Program	26.1	Ketersediaan Obat dan Vaksin	1 Paket	10.436.000.000	1 Paket	12.191.504.171	1 Paket	15.109.805.005	1 Paket	17.513.766.006	1 Paket	20.100.519.208	5 Paket	75.351.594.390	Dinas Kesehatan
	Distribusi Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Logistik Program ke Kabupaten/Kota	26.2	Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang terlayani sesuai dengan permintaan/kebutuhan dan atau alokasi pengelola program	1 Paket	3.423.586.809	1 Paket	4.500.000.000	1 Paket	5.000.000.000	1 Paket	6.700.000.000	1 Paket	9.040.000.000	5 Paket	28.663.586.809	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian	26.3	Tertindakannya kegiatan Peningkatan Kapasitas pengelola obat	29 Orang	265.000.000	29,2 Orang	275.000.000	29 Orang	280.000.000	29 Orang	285.000.000	29 Orang	290.000.000	5 Orang	1.395.000.000	Dinas Kesehatan
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	26.4	Tertindakannya Evaluasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dasar dan Program	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	185.000.000	1 Laporan	190.000.000	5 Dokumen	890.000.000	Dinas Kesehatan
2.1.1.19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 25% fasilitas pelayanan kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas	25%	8.150.226.260	31%	10.595.294.138	46%	13.773.882.379	62%	17.906.047.093	77%	23.277.861.221	100%	73.703.311.091	Dinas Kesehatan
													4.000.000.000		12.033.882.379	
	Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat (Mobile Klinik)	19.1	Jumlah paket pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan	1 Paket		5 Paket		Dinas Kesehatan								
	Peningkatan Kapasitas Perawat tentang Pertolongan Pertama Gawat Darurat	19.2	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan	29,2 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan
	Workshop Keselamatan Pasien	19.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti workshop Keselamatan Pasien	29,2 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan
	Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen	19.4	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti workshop Internal dan Tinjauan Manajemen	29,2 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan
2.1.1.19.02			Cakupan Balita OAP Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%		100%		100%		100%		100%	5.000.000.000		13.500.000.000	
	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	10.1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan								
	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat	10.2	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan	1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan								
	Kampanye Sadar Gizi	10.3	Jumlah paket kegiatan kampanye	1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan								
	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Penggunaan Standar Pemantauan dan Pertumbuhan Balita	10.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan
	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Konseling Pemberian ASI	10.4	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan
	Surveilans Penentuan Status Gizi	10.5	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan surveilans	13 Kab/Kota		13 Kab/Kota		29 Kab/Kota		29 Kab/Kota		29 Kab/Kota	100 Orang			Dinas Kesehatan
	Pelacakan Kasus Gizi Buruk	10.6	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pelacakan	13 Kab/Kota		13 Kab/Kota		29 Kab/Kota		29 Kab/Kota		29 Kab/Kota	100 Orang			Dinas Kesehatan
	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk	10.7	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan
	Pengadaan Bangunan dan Fasilitas TFC (Therapeutic Feeding Center)	10.8	Jumlah bangunan dan fasilitas TFC yang dapat disediakan	1 Paket		5 Paket		Dinas Kesehatan								
	Penyediaan logistik penunjang program gizi	10.9	Jumlah paket logistik penunjang program gizi yang dapat disediakan	1 Paket		5 Paket		Dinas Kesehatan								
2.1.1.19.03			Persentase Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)	70%		80%		90%		100%		100%	1.500.000.000		5.100.000.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi	18.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan								
	Pertemuan Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi I	18.2	Tersedia 1 laporan jumlah kesepertaan JKN	1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan								
	Pertemuan Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi II	18.3	Tersedia 1 laporan jumlah kesepertaan JKN	1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan								
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Bagi FKTP di Provinsi Papua Barat	18.4	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang	150 Orang			Dinas Kesehatan
	Bimtek dan Move Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	18.5	Tersedia 13 laporan bimtek dan move	13 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan								
	Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi	18.6	Tersedia 1 laporan pelaksanaan JKN	1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan								
2.1.1.19.04			Persentase Kemitraan Kesehatan Terhadap Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Kemasyarakatan	25%		30%		35%		40%		50%	400.000.000		1.755.294.138	
	Rapat koordinasi penyelenggaraan program kemitraan kesehatan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat	16.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1												Dinas Kesehatan
			Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	13		13		13		13		13	2.500.000.000		6.282.159.019	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	14.1	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat	29										0 Orang		Dinas Kesehatan
	Pemberdayaan penyediaan sarana dan sanitasi dasar	14.2	Tersedianya sarana air minum dan sanitasi dasar oleh masyarakat hasil dari pemberdayaan	29										0 Orang		Dinas Kesehatan
	Peningkatan kualitas stakeholder dari lintas sektor tentang strategi menuju pasar tradisional yang sehat	14.3	Tersedianya stakeholder dan lintas sektor yang berwawasan pasar tradisional sehat	1										5 Dokumen		Dinas Kesehatan
	Pelatihan /refreshing pengelola program kesehatan lingkungan	14.4	Meningkatnya tenaga kesehatan lingkungan yang terlatih	29										0 Orang		Dinas Kesehatan
	Peretemuan evaluasi program penyehatan pangan	14.5	Meningkatnya presentase tempat pengelola makanan yang memenuhi syarat kesehatan	1										5 Dokumen		Dinas Kesehatan
	Bimbingan Teknis Program Kesehatan lingkungan	14.6	Meningkatnya presentase tempat pengelola makanan yang memenuhi syarat kesehatan	1										5 Dokumen		Dinas Kesehatan
	Pertemuan program evaluasi STBM	14.7	Meningkatnya jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	29										0 Orang		Dinas Kesehatan
2.1.1.19.05			Persentase Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Hidup Sehat	100%		100%		100%		100%		100%	440.000.000		2.200.000.000	
	Pelatihan Untuk Pelatih Keluarga Sehat	13.1	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan untuk pelatih	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang				Dinas Kesehatan
	Koordinasi dan Bimbingan Keluarga Sehat Kab/Kota	13.2	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan				Dinas Kesehatan								
2.1.1.19.06			Menurunkan Angka Kematian Bayi OAP menjadi < 10 per Kelahiran Hidup	< 10		< 10		< 10		< 10		< 10	2.500.000.000		7.682.159.019	
	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	8.1	Tertindakannya Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan
	Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Pelayanan Neonatal	8.2	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Neonatal	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan
	Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia	8.3	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan
	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	8.4	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan
	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	8.5	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	116,2 Orang			Dinas Kesehatan

	Orientasi dan Sosialisasi Manajemen Terpadu Balita Sakit-Masyarakat (MTBS- M)	8.6	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Dokter Umum tentang Pelayanan Kesehatan Anak	8.7	Jumlah Dokter Umum Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Penanganan Intelektual Bayi	8.8	Jumlah Dokter Umum Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Guru PAUD tentang Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	8.9	Jumlah Guru PAUD Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	8.10	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	Penyediaan Paket Penunjang Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	8.11	Jumlah Paket Fasilitas Pelayanan yang dapat disediakan	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		5	Paket		-	Dinas Kesehatan	
2.1.19.07			Persentase Kab/Kota yang Memiliki Profil Kesehatan Setiap Tahunnya		31%			46%			62%			77%		100%	866.047.093		3.098.002.408		
	Evaluasi dan Monitoring Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	6.2	Terkumpul dan Termutakhirnya Data Profil Kesehatan Provinsi	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan		100%			100%			100%			100%		800.000.000		3.600.000.000			
	Advokasi tentang Pembentukan Team Gerak Cepat tingkat kab/kota	39.1	Terbentuknya Tim reaksi cepat/ RHA dan Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1															-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Peningkatan kapasitas petugas Team gerak cepat	39.2	Peningkatan kapasitas petugas Team Gerak Cepat(TGC)	26															-	Dinas Kesehatan	
	Pengelolaan Data dan Informasi PKK	39.3	Terbentuknya Pengelolaan Data dan Informasi PKK	1															-	Dinas Kesehatan	
2.1.19.09			Menurunkan Angka Kematian Ibu OAP menjadi < 50 perkelahiran Hidup		< 50			< 50			< 50			< 50		2.400.000.000		6.900.000.000			
	Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Penguatan Pelayanan Antenatal Terpadu dan Kesehatan Reproduksi	9.1	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA)	9.2	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Kelas Ibu Hamil	9.3	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	45	Orang		45	Orang		45	Orang		45	Orang		180	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Orientasi Supervisi Fasilitatif	9.4	Jumlah Bidan Koordinator yang mengikuti orientasi	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Antenatal Terpadu	9.5	Jumlah Paket Fasilitas Pelayanan yang dapat disediakan	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		5	Paket		-	Dinas Kesehatan	
2.1.19.10			Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/kota		100%			100%			100%			100%		2.000.000.000		5.600.000.000			
	Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	10.1	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KIA)	10.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Penjarangan Kesehatan Anak Sekolah	10.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Sosialisasi Pembinaan UKS pada Anak dengan Kebutuhan Khusus	10.4	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Forum Komunikasi Jejaring Kemitraan Pembinaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	10.5	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	Forum Komunikasi Perlindungan Kesehatan Anak	10.6	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	10.7	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	Penyediaan Paket Penunjang Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	10.8	Jumlah paket penunjang berupa UKS Kit yang dapat disediakan	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		5	Paket		-	Dinas Kesehatan	
2.1.19.11			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/kota		100%			100%			100%			100%		500.000.000		1.980.000.000			
	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif	11.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
2.1.19.12			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Kabupaten/kota		100%			100%			100%			100%		660.000.000		3.300.000.000			
	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	12.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	12.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		116,2	Orang		-	Dinas Kesehatan	
	Pengadaan Lansia KIT	12.3	Jumlah Lansia Kit yang dapat disediakan	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		5	Paket		-	Dinas Kesehatan	
2.1.19.13			Persentase Kab/kota yang melaksanakan Keluarga Sehat		25%			30%			35%			40%		50%	3.271.814.128		7.371.814.128		
	Koordinasi dan Bimbingan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	13.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1															-	Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Kualitas tenaga promosi kesehatan diberbagai jenjang	13.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29															-	Dinas Kesehatan	
	Pengadaan sarana dan prasarana promosi kesehatan daerah	13.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan yang dapat disediakan	1															-	Dinas Kesehatan	
2.1.19.14			Persentase Pelayanan Kesehatan Yang dilaksanakan dilingkungan kantor Gubernur Papua Barat		100%			100%			100%			100%		1.000.000.000		4.600.000.000			
	Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat sekitar kantor gubernur Papua Barat	14.1	Jumlah paket pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	Penyediaan Logistik Pelayanan Kesehatan Dasar Klinik Kantor Gubernur Papua Barat	14.2	Jumlah paket logistik pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		5	Paket		-	Dinas Kesehatan	
	Sosialisasi Pencegahan dan pemeliharaan penyakit kronis	14.3	Jumlah pertemuan sosialisasi yang dilakukan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
2.1.19.15			Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja		31%			46%			62%			77%		100%	440.000.000		2.200.000.000		
	Rapat koordinasi penyelenggaraan program kesehatan kerja	15.1	Tersosialisasinya program kesehatan kerja	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan tenaga Pengelola Program Kesehatan Kerja	15.2	Terlaksananya kegiatan program kesehatan kerja di kab/kota	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
2.1.23			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas		10%	38.465.377.230		29%	56.207.810.197		49%	61.973.864.657		68%	67.122.739.950		87%	71.243.335.741		100%	295.013.127.775
	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Akreditasi Puskesmas	23.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan tenaga Pengelola Akreditasi Puskesmas	23.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26	Orang		26	Orang		26	Orang		26	Orang		104	Orang		-	Dinas Kesehatan	

	Bimtek dan Monev Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	23.3	Tersedia 13 laporan bimtek dan monev	13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Puskesmas Terintegrasi dengan Pendekatan Keluarga	23.4	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
			Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	70%		80%		90%		100%							
2.1.1.24	Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit Rujukan		Jumlah Rumah Sakit Rujukan	0	105.555.923.025	0	110.833.719.176	1	116.375.405.135	2	122.194.175.392	3	128.303.884.161	6	RSUD	583.263.106.889	Dinas Kesehatan
																3.300.000.000	
	Pertemuan Jejaring Rumah Sakit se-Papua Barat I	24.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Pertemuan Jejaring Rumah Sakit se-Papua Barat II	24.2	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Coder dan Administrasi INA CBG's Bagi Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat	24.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		104 Orang		Dinas Kesehatan			
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0192		0,0229		0,0229		0,0244		0,0244		#REF!	533.187.769.075	Dinas Kesehatan	
	Pembangunan Rumah Sakit	25.1	Tersedianya Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Secara Bertahap	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket		Dinas Kesehatan			
	Registrasi Rumah Sakit	25.2	Tersedianya Registrasi Rumah Sakit Provinsi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran / Laboratorium Rumah Sakit	25.3	Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium Rumah Sakit	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket		Dinas Kesehatan			
			Cakupan Sarana dan Prasarana UTD dan BDRS Tingkat Provinsi	70%		80%		90%		100%		100%			46.775.337.814		
	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Darah	29.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Pelatihan Tenaga Dokter dalam Pelayanan Darah di UTD dan BDRS	29.2	Jumlah tenaga dokter yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29.2 Orang		29 Orang		29 Orang		145 Orang		Dinas Kesehatan			
	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Darah di UTD dan BDRS	29.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29.2 Orang		29 Orang		29 Orang		145 Orang		Dinas Kesehatan			
	Sarana dan Prasarana UTD Tingkat Provinsi	29.4	Tersedianya Sarana dan Prasarana UTD Tingkat Provinsi	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
2.1.1.17	Program Rujukan kesehatan bagi orang Papua		Persentase Pasien Masyarakat OAP Sakit Berat di Rujuk	100%	20.571.461.156	100%	24.685.753.388	100%	29.622.904.065	100%	35.547.484.878	100%	42.656.981.854	100%	153.084.585.341	Dinas Kesehatan	
	Rujukan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua	17.1	Tersedianya Akses Rujukan Kesehatan Bagi Orang Papua	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket		Dinas Kesehatan			
	Operasional Program Rujukan Bagi Orang Asli Papua	17.2	Terbiayainya Operasional Program Rujukan bagi Orang Asli Papua	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Sosialisasi Rujukan Kesehatan Bagi Orang Papua tingkat Provinsi	17.3	Peningkatan pemahaman regulasi program	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
2.1.1.31	Program Pengiriman dan Pendisiplinan Tenaga Kesehatan ke Distrik, Kampung Terpencil dan Terisolir		Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa (OAP) Yang ditempatkan	29	1.296.000.000	29	1.555.200.000	29	1.866.240.000	29	2.239.488.000	29	2.687.385.600	29	9.644.313.600	Dinas Kesehatan	
	Menempatkan Tenaga Kesehatan Strategis pada daerah perbatasan	31.1	Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan	29 Orang		29.2 Orang		29 Orang		29 Orang		Orang		Dinas Kesehatan			
	Menempatkan Bidan Desa pada daerah terisolir	31.2	Jumlah Bidan yang ditempatkan	29 Orang		29.2 Orang		29 Orang		29 Orang		Orang		Dinas Kesehatan			
	Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Tenaga Kesehatan	31.3	Tersedia 13 laporan monev keberadaan Tenaga Kesehatan	13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		Dokumen		Dinas Kesehatan			
			Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk	TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53		TK : 1,32; D : 0,65; TM : 0,67		TK : 1,57; D : 0,77; TM : 0,80		TK : 1,81; D : 0,89; TM : 0,92		TK : 2; D : 1; TM : 1					
	Pembinaan, Pengembangan dan Pengkajian Penyelenggaraan SDM Kesehatan	30.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Monitoring dan Evaluasi Data SDMK	30.2	Tersedia 13 laporan monev Data SDMK	13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
2.1.1.35	Program Imunisasi		Pencapaian Uci desa	64,74	1.650.000.000	73,83%	1.815.000.000	82,73%	1.996.500.000	91,43%	2.196.150.000	100,00%	2.415.765.000	100%	10.073.415.000	Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi	35.1	Jumlah dinas kesehatan yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan imunisasi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Komda KIPi	35.2	Jumlah kab/kota yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan KIPi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Pelacakan kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) dan pengambilan spesimen AFP	35.3	Ditemukan adanya kasus AFP	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam Penanganan KLB PD31 dan PIE	35.4	Meningkatnya pengetahuan tentang penanggulangan KLB PD31 dan PIE	26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		130 Orang		Dinas Kesehatan			
2.1.1.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM	85%	836.000.000	90%	919.600.000	94%	1.011.560.000	98%	1.112.716.000	100%	1.223.987.600	100%	5.103.863.600	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	45.1	Terdapat Jumlah petugas yang terlatih untuk Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	24 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		128 Orang		Dinas Kesehatan			
	Sosialisasi penanggulangan penyakit tidak menular	45.2	Terdapat Jumlah petugas yang terlatih dalam penanggulangan penyakit tidak menular	15 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		119 Orang		Dinas Kesehatan			
	Pembentukan Posbindu	45.3	Terbentuknya Posbindu di semua Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Melaksanakan advokasi	45.4	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegangan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota	100%		100%		100%		100%		100%					
	Peningkatan kapasitas pengelola penderita Hipertensi	40.1	Adanya keperluan petugas dalam pengelolaan program penderita hipertensi di kab/kota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota	100%		100%		100%		100%		100%					
	Peningkatan kapasitas tenaga pengelola penderita DM	41.1	Adanya keperluan petugas dalam pengelolaan program penderita DM di kab/kota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
2.1.1.22	Program Kesehatan Haji		Angka kematian calon jemaah haji < 2 per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji sampai tahun 1443H / 2022M	< 2	385.000.000	< 2	423.500.000	< 2	465.850.000	< 2	512.435.000	< 2	563.678.500	< 2	2.350.463.500	Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Haji	22.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan									5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
	Pelatihan Tim Pemeriksa Kesehatan Haji	22.2	Jumlah tenaga Tim Pemeriksa Kesehatan Haji yang mengikuti pelatihan									0 Orang		Dinas Kesehatan			
	Penyediaan Logistik Pelayanan Kesehatan Haji	22.3	Jumlah paket logistik pelayanan kesehatan haji yang tersedia di Kabupaten/Kota									5 Paket		Dinas Kesehatan			
	Pendampingan Calon Jemaah Haji selama di Embarkasi	22.4	Terpantainya kondisi kesehatan calon jemaah haji									5 Dokumen		Dinas Kesehatan			
2.1.1.27	Program Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer		Jumlah Tanaman Obat Asli Papua Yang terdapat	20	220.000.000	40	242.000.000	60	266.200.000	80	292.820.000	100	322.102.000	280	Data	1.343.122.000	Dinas Kesehatan

	Pendataan dan pembinaan tanaman obat asli Papua	27.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Dokumen	Dinas Kesehatan				
2.1.14.2	Program Kesehatan Jiwa		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota	100%	330.000.088	100%	363.000.097	100%	399.300.106	100%	439.230.117	100%	483.153.129	100%	2.014.683.537	Dinas Kesehatan
	Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Jiwa	42.1	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	130 Orang	Dinas Kesehatan				
	Study Banding Pelayanan Kesehatan Jiwa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Boqor	42.2	Jumlah dokumen konsultasi teknis ke Pusat yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Dokumen	Dinas Kesehatan				
	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Keswa Napza	42.3	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Dokumen	Dinas Kesehatan				
2.1.1.49	Program Kesehatan Indra		Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan	3	495.000.000	5	544.500.000	8	598.950.000	11	658.845.000	13	724.729.500	13	3.022.024.500	Dinas Kesehatan
	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Indera	49.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Dokumen	Dinas Kesehatan				
	Pelatihan pemeriksaan kesehatan indera	49.2	Terlathinya petugas kesehatan indera pada FKTP	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	130 Orang	Dinas Kesehatan				
2.1.1.50	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022	1.90%	7.800.522.939	1.80%	8.580.575.233	1.70%	9.438.632.756	1.60%	10.382.496.032	1.50%	11.420.745.635		47.622.972.595	Dinas Kesehatan
	Pelatihan manajemen HIV Komprehensif	34.1	Terlathinya tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat	26 Orang	30 Orang	32 Orang	34 Orang	36 Orang	158 Orang				9.400.522.939		Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Penemuan Kasus Baru HIV Positif (OAP)	34.2	Ditemukan dan dilayannya seluruh penderita HIV khususnya (OAP) sesuai standar Cakupan Penanggulangan Diare	2.00 %	1.90 %	1.80 %	1.70 %	1.60 %	1.50 %						Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Diare	48.1	Terdapatnya kesepakan dalam melaksanakan rencana tindak lanjut.	1	100%	100%	100%	100%	100%				8.161.207.989		Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Kapasitas Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Diare, Hepatitis dan ISP	48.2	Peningkatan Kapasitas Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB Diare, Hepatitis, ISP	23											Dinas Kesehatan	
	Penanggulangan KLB Diare, Hepatitis dan ISP	48.3	Tertanggulangnya KLB Diare, Hepatitis, ISP Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%				2.500.000.000		Dinas Kesehatan	
	Pelatihan pemegang program	47.1	Terdapatnya petugas frambusia yang terlatih												Dinas Kesehatan	
	Penemuan kasus	47.2	Meningkatnya Jumlah kasus baru frambusia yang di temukan												Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				2.500.000.000		Dinas Kesehatan	
	Peningkatan kapitas tenaga pengelola ISPA Kabupaten	46.1	Adanya keperduluan petugas dalam pengelolaan program ISPA di kab/kota	23											Dinas Kesehatan	
			Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta	3	5	8	11	13	2.500.000.000						Dinas Kesehatan	
	Leprosy Day	43.1	Mensosialisasikan Kusta pada masyarakat	1											Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Kusta bagi Tenaga Kesehatan di Kab/ Kota	43.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26											Dinas Kesehatan	
			Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis	85%	90%	95%	97%	100%	5.850.000.000						Dinas Kesehatan	
	Peningkatan kapasitas Petugas	44.1	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Petugas												Dinas Kesehatan	
	Pencanangan Bulan Eliminasi kaki Gajah	44.2	Terlaksananya gerakan Bulan Eliminasi kaki Gajah Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria	65.04%	88.78%	90.50%	95.49%	100%	7.654.000.000						Dinas Kesehatan	
	Pelatihan dasar pengendalian vektor/ entomologi	36.1	Terdapatnya tenaga Entomologi yang terlatih di puskesmas	26											Dinas Kesehatan	
	Pelatihan / Refreshing training tatalaksana kasus malaria bagi dokter ,perawat ,bidan yang terlatih	36.2	Meningkatnya Jumlah dokter ,Perawat ,bidan yang terlatih	26											Dinas Kesehatan	
	Pelatihan / Refreshing training tatalaksana kasus malaria bagi dokter ,perawat ,bidan yang terlatih	36.3	Meningkatnya Jumlah dokter ,Perawat ,Bidan yang terlatih	26											Dinas Kesehatan	
	Pelatihan mikroskopis bagi crosschecker provinsi dan kabupaten/kota	36.4	Meningkatnya Jumlah Crosschecker malaria yang terlatih	26											Dinas Kesehatan	
	Pelatihan tatalaksana kasus malaria bagi tenaga mikroskopis malaria	36.5	Meningkatnya Jumlah mikroskopist yang dilatih	26											Dinas Kesehatan	
	Pelatihan tenaga surveillance kabupaten dan provinsi	36.6	Tersedianya tenaga surveillans malaria yang terlatih	26											Dinas Kesehatan	
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	6.928.992.064						Dinas Kesehatan	
	Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan penanggulangan KLB	37.1	Terbentuknya Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan penanggulangan KLB	1											Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Penyusunan kebijakan program DBD	37.2	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan												Dinas Kesehatan	
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	87.94%	90.51%	92.96%	95.41%	100%	4.628.249.603						Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Hospital DOTS Linkage	38.1	Meningkatnya kemampuan Tim DOTS RS	26											Dinas Kesehatan	
	Workshop Manajemen TB Tingkat Provinsi	38.2	Meningkatnya kemampuan Tim Manajemen TB Tingkat Provinsi	26											Dinas Kesehatan	
	Supervisi / Bimtek ke fasilitas pelayanan kesehatan	38.3	Meningkatnya kualitas di fasilitas pelayanan kesehatan	13											Dinas Kesehatan	
2.1.1.33	Program Registrasi dan Akreditasi		Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	70%	18.736.275.800	80%	20.609.903.380	90%	22.670.893.718	100%	24.937.983.090	100%	27.431.781.399		114.386.837.387	Dinas Kesehatan
	Sosialisasi, koordinasi dan penguatan jejaring kerja MTKP	33.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Dokumen	Dinas Kesehatan				
	Melaksanakan sertifikasi dan proses registrasi	33.2	Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Dokumen	Dinas Kesehatan				
			Cakupan tenaga kesehatan yang meningkatkan kapasitas dalam perencanaan pembangunan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Dinas Kesehatan	
	Seleksi dan pengiriman tenaga kesehatan teladan	30.3	Jumlah tenaga kesehatan yang dihasilkan	29 Orang	29,2 Orang	29 Orang	29 Orang	29 Orang	145 Orang						Dinas Kesehatan	
			Cakupan tenaga kesehatan yang meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%							Dinas Kesehatan	
	Pelatihan fungsional dan manajemen Kesehatan	32.1	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional dan manajemen	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	250 Orang						Dinas Kesehatan	
	Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan	32.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	500 Orang						Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik	33.3	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti peningkatan kapasitas	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	50 Orang						Dinas Kesehatan	
			Cakupan tenaga kesehatan yang meningkatkan kapasitas dalam pelayanan rujukan	100%	100%	100%	100%	100%							Dinas Kesehatan	
	Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis (OAP) RS Rujukan Papua Barat	33.4	Jumlah Dokter Spesialis (OAP) yang mengikuti pendidikan	0 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	36 Orang				46 Orang		Dinas Kesehatan	
	Pendidikan Apoteker Khusus Orang Asli papua di Fasyankes	33.5	Jumlah Orang Asli Papua yang mengikuti Pendidikan Apoteker di Fasyankes	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	100 %						Dinas Kesehatan	
2.1.1.34	Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit PKS Jamkesmas		Cakupan jumlah rumah sakit PKS Jamkesmas	3	639.167.025	5	671.125.376	7	704.681.645	10	739.915.727	15	776.911.514		3.531.801.287	Dinas Kesehatan

BAB. VII

KINERJA  
PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikasi rencana program dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA ) Program Prioritas 2017 – 2022 OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Indikasi program prioritas disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal R.JMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun					kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
1	Jumlah Kematian Ibu /OAP	Absolute	49 / 35	45 / 30	40 / 25	35 / 20	30 / 15	25 / 10	25 / 10
2	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil di Kabupaten/ kota	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Kabupaten/ kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Kematian Bayi / OAP	Absolute	185 /150	180 / 145	175 / 140	170 / 135	165 / 130	160 / 125	160 / 125
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	-	30%	40%	50%	60%	70%	70%
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di kabupaten/ kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten/ kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten /kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan Balita OAP Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	60%	79%	91%	100%	100%	100%	100%

11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/ kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Kabupaten/ kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Cakupan Keluarga Sehat Tingkat Provinsi	%	-	20%	25%	30%	35%	40%	40%
14	Kab/Kota Sehat	Kabupaten/ Kota	-	1 kab / kota	4 kab/kota				
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat OAP dan Penduduk Miskin	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase Kader Kesmas yang Memahami Swamedikasi	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	%	-	15%	31%	46%	62%	77%	77%
18	Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Olah Raga	%	-	15%	31%	46%	62%	77%	77%
19	Angka Kematian Calon Jemaah Haji	Absolute	-	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
20	Cakupan Puskesmas Terakreditasi di Distrik	%	3%	10%	29%	49%	68%	87%	87%
21	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	0,17	0,17	0,18	0,2	0,22	0,23	23%
22	Rasio Posyandu per satuan balita per 100 Balita	per 1.000 penduduk	11,53	11,61	11,69	11,77	11,84	11,92	1192%
23	Cakupan Puskesmas Menurut Distrik	%	69,27 %	71,56 %	77,58 %	83,33 %	88,84 %	94,12 %	94%

24	Jumlah Puskesmas Yang Terintegrasi Dengan Pendekatan Keluarga	Unit	0	17	20	25	25	30	3000%
25	Jumlah Rumah Sakit Rujukan	Unit	2	2	2	3	4	4	400%
26	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	0,0179	0,0186	0,0192	0,0229	0,0229	0,0244	2%
27	Jumlah Realisasi Permohonan Izin RS Kelas B Yang Tepat Syarat	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,59	0,76	1,05	1,32	1,57	1,81	181%
30	Rasio Dokter per satuan penduduk per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,21	0,38	0,52	0,65	0,77	0,89	89%
31	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,38	0,38	0,53	0,67	0,8	0,92	92%
32	Prevalensi HIV/AIDS	%	2,70%	2,00%	1,90%	1,80%	1,70%	1,60%	2%
33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko HIV di Kabupaten/kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Cakupan Kampung/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	45,92%	55,44%	64,74%	73,83%	82,73%	91,43%	91%
35	Cakupan Kabupaten Kota Dengan Imunisasi Dasar Lengkap ≥ 80%	%	-	30,00%	50%	75%	100%	100%	100%
36	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria	%	36,49%	48,39%	65,04%	88,78%	90,50%	95,49%	95%
37	Cakupan Penemuan dan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Penanganan Penderita Penyakit DBD								
38	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	68,45 %	74,31 %	87,94 %	90,51 %	92,96 %	94,41 %	94%
39	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Berada Dalam Kondisi KLB	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
44	Jumlah Kabupaten dengan Eliminasi Kusta	Kabupaten /Kota	-	-	3	5	8	11	11
45	Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis	%	-	80%	85%	90%	95%	97%	97%
46	Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM	%	-	80%	85%	90%	94%	98%	98%
47	Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

48	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
49	Cakupan Penanggulangan Diare	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	Persentase Kabupaten/ Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan yankes indera sesuai standar	Kabupaten / Kota	1	2	3	5	8	11	11

BAB. VIII

PENUTUP



## BAB VIII

### P E N U T U P

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dapat disusun untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Papua Barat yang makin berat, kompleks dan kadang tidak terduga.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ini diharapkan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2017-2022. Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.